

# Indonesia dalam Era Disrupsi

**Editor:**  
Dr. Suwardi

**Penulis:**  
Dr. Sutoyo, M.Pd  
Dr. Ir.Dewi Ratna Nurhayati, MP.  
Halifa Haqqi, S.IP.,M.Si.  
Haryo Kusumo Aji, S.I.Kom., M.I.Kom.  
Andri Astuti Itasari S.Sos., M.I.Kom.  
Hasna Wijayati, S.IP. M.A.

**Penerbit**  
Unisri Press © 2020



# **Indonesia dalam Era Disrupsi**

## **Editor:**

Dr. Suwardi

## **Penulis:**

Dr. Sutoyo, M.Pd

Dr. Ir.Dewi Ratna Nurhayati, MP.

Halifa Haqqi, S.IP.,M.Si.

Haryo Kusumo Aji, S.I.Kom., M.I.Kom.

Andri Astuti Itasari, S.Sos., M.I.Kom.

Hasna Wijayati, S.IP. M.A.

ISBN : 978-623-93591-7-1

Desain sampul dan tata letak:

Rusdianto

## **Penerbit:**

**UNISRI Press**

Jalan Sumpah Pemuda No 18, Joglo, Banjarsari,

Kota Surakarta

unisripress@gmail.com

Anggota APPTI

Dicetak oleh Percetakan Kurnia Solo

Cetakan Pertama, Juni 2020

Copyright © 2020

ISI MENJADI TANGGUNG JAWAB PENULIS

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang, dilarang  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin  
tertulis dari penerbit.

# Kata Pengantar

Revolusi industri berlangsung tanpa bisa dihentikan. Kini, dunia telah memasuki era revolusi industri keempat, yang dicirikan pada keberadaan teknologi digital bersama segala kecanggihan *internet of things*. Keberadaan internet yang seolah tanpa batas menghadirkan era baru yang dikenal sebagai era disrupsi. Dampak positif dan negatif pun dapat mengiringi perkembangan era baru ini. Banyak orang khawatir bahwa manusia akan kalah dengan teknologi, hingga muncul prediksi aneka pekerjaan apa saja yang akan hilang seiring perkembangan *artificial intelegent*. Padahal, dengan strategi yang tepat, semisal mengoptimalkan konsep *human centered* pada pola *society 5.0*, mungkin bisa jadi jawaban akan kekhawatiran tersebut.

Indonesia pun menghadapi dilematika yang serupa. Indonesia harus mampu bersiap dengan berbagai langkah dan strategi, serta mengenali kondisi apa yang tengah dihadapi. Dengan begitu, Indonesia dapat memenangkan era disrupsi ini, dan muncul sebagai bangsa yang besar. Buku ini merupakan hasil kolaborasi pemikiran terkait bagaimana gambaran posisi Indonesia dalam era disrupsi, sekaligus langkah apa yang telah dan dapat dilakukan. Pemikiran yang tertuang dalam buku ini merangkum berbagai bidang studi karena para penulis memiliki latar belakang studi yang berbeda-beda sehingga menghasilkan alur pemikiran yang khas. Tentu saja, muara dari masing-masing tema mengerucut pada upaya “Menakar Indonesia dalam Era Disrupsi”.

Para penulis adalah dosen dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta, dengan latar belakang bidang ilmu pendidikan, ilmu pertanian, ilmu hubungan, internasional, juga ilmu komunikasi. Para penulis memiliki minat yang sama dalam mengamati pola perkembangan era disrupsi di bidangnya masing-masing. Lantas, lahirlah sinergi untuk menyatukan pemikiran dari berbagai latar belakang ini, menjadi kesatuan yang padu. Buku ini diharap bisa menyajikan gambaran tentang Indonesia di era disrupsi, sehingga para pembaca dapat menangkapnya sebagai peluang dan bersiap dengan strategi.

**Editor,**

**Dr. Suwardi**

# Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
<b>Pendidikan Nilai Pancasila di Era Industri 4.0 dalam Rangka Mewujudkan Jati Diri Bangsa yang Maju dan Bermartabat, oleh Dr. Sutoyo, M.Pd.....</b>	<b>1</b>
<b>Makna RI 4.0 bagi Pertanian, oleh Dr. Ir. Dewi Ratna Nurhayati, MP.....</b>	<b>42</b>
<b>Kebijakan “<i>Making Indonesia 4.0</i>” sebagai Langkah Membangun <i>Society 5.0</i>, oleh Halifa Haqqi, S.IP., M.A.....</b>	<b>49</b>
<b><i>Youtube</i> menjadi Tempat Belajar Masa Kini, oleh Haryo Kusumo Aji, S.I.Kom., M.I.Kom.....</b>	<b>64</b>
<b>Digitalisasi dan Perubahan Sosial di Era Disrupsi, oleh Andri Astuti Itasari, S.Sos., M.I.Kom.....</b>	<b>73</b>
<b>Menakar <i>Side Effect</i> RI 4.0 dan Kesiapan Indonesia, oleh Hasna Wijayati, S.IP., M.A.....</b>	<b>80</b>

# **Pendidikan Nilai Pancasila di Era Industri 4.0 dalam Rangka Mewujudkan Jati Diri Bangsa yang Maju dan Bermartabat**

Dr. Sutoyo, M.Pd  
Email: Sutoyoptama@gmail.com

## **Pendahuluan**

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai bekal kehidupan di masyarakat. Pendidikan dapat dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang dilaksanakan secara formal melalui pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi dengan kurikulum yang sudah dibakukan. Pendidikan non formal merupakan pendidikan yang dilaksanakan di masyarakat tanpa menggunakan kurikulum yang dibakukan, yang disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan pendidikan informal merupakan pendidikan yang berlangsung di dalam keluarga.

Hal tersebut sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Secara ringkas bahwa tujuan pendidikan

nasional adalah untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia yang cerdas, terampil dan bermoral. Tujuan ini merupakan tujuan yang sangat ideal yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Namun tingkat ketercapaiannya secara realitas sangatlah sulit untuk diwujudkan.

Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (Ipteks) yang selalu berkembang tiada henti, menuntut kesiapan dan komitmen para pemangku kebijakan pendidikan untuk mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Apalagi saat sekarang kita sudah memasuki era industri 4.0. Era ini ditandai dengan digitalisasi dalam semua aspek kehidupan. Bagaimana pendidikan nilai Pancasila berperan dalam era industri 4.0. Sebab semaju apapun negara dan bangsa ini, nilai karakter bangsa tidak boleh diabaikan. Justru kalau bangsa ini menginginkan maju dan tidak ingin hancur, maka pendidikan nilai Pancasila harus ditanamkan kepada peserta didik sejak usia dini. Pendidikan nilai Pancasila merupakan pendidikan nilai yang tidak sekedar menuntut pada pemahaman secara kognitif, melainkan pendidikan yang utuh sampai tataran internalisasi nilai.

### **Penyimpangan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.**

Sejak munculnya era industri 1.0 sampai saat ini, era industri 4.0, penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila terus terjadi dan seakan-akan tidak ada hentinya. Hal ini terjadi baik pada tataran penyelenggaraan negara dan pemerintahan maupun dalam

tataran kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Sorotan terhadap perilaku menyimpang para elit politik, jajaran eksklusif, legislatif, dan yudikatif selalu terus bermunculan. Begitu pula sorotan tentang perilaku menyimpang masyarakat sebagai warga negara Indonesia yang seakan-akan tidak pernah ada hentinya. Jika penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dibiarkan dan tidak ada solusi maka akan dapat melemahkan sendi-sendi dalam kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara realita saat ini banyak penyimpangan terhadap nilai-nilai sila I yakni sila Ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dapat dilihat, bahwa masih banyak orang yang mengaku dan menyatakan percaya dan bertaqwa terhadap Tuhan, namun kenyataannya tidak menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Misalnya mengaku beragama Islam, Kristen, Katolik atau agama yang lain, tetapi hanya dalam kartu tanda penduduk (KTP). Tuntutan sikap saling hormat menghormati, sikap bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam menjalankan ibadah yang seharusnya dapat menciptakan terbinanya kerukunan dalam hidup bermasyarakat sering tercederai dengan adanya sikap, tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Justru kadang muncul sikap memaksakan kehendak dari satu penganut agama dan kepercayaan kepada penganut agama dan kepercayaan yang lain.

Di kalangan peserta didik masih ada penyimpangan terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana masih banyak peserta didik yang tidak bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.



Saat sekarang banyak peserta didik yang memakai pakaian yang kurang menutup auratnya, minum-minuman keras, menggunakan narkoba, melakukan hubungan seks bebas, dan bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri,

Masih kurangnya pemahaman dan pengamalan dalam wujud tindakan dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat terhadap nilai-nilai sila ke II yakni Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi salah satu penyebab hubungan secara horisontal antar warga yang satu dengan warga yang lain kurang harmonis. Sikap pengakuan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban, sikap harus saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semana-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan senang melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang seharusnya itu menjadi ciri masyarakat Indonesia dalam menjalin hubungan dalam kehidupan bermasyarakat belum bisa terwujud secara baik dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai sila Kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya belum semuanya terwujud secara nyata. Secara khusus di kalangan peserta didik juga banyak penyimpangan terhadap sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Penyimpangan yang dilakukan oleh peserta didik, diantaranya adanya perkelahian antar pelajar yang disertai dengan

penyiksaan, playboy di kalangan pelajar dimana mempermainkan wanita dengan sesuka hati, dan pemerkosaan oleh pelajar.

Nilai sila Persatuan Indonesia mengandung makna usaha kearah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Kenyataan menunjukkan bahwa masih bermunculan sikap tidak berani berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menunjukkan sikap kebarat-baratan dan tidak cinta tanah air, membanggakan bangsa lain dari pada bangsanya sendiri, mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum dan golongan. Artinya nilai-nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia belum sepenuhnya dipahami dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Di kalangan peserta didik juga banyak kita jumpai penyimpangan terhadap sila persatuan Indonesia. Penyimpangan itu diantaranya, adalah adanya penurunan sikap nasionalisme. Misalnya bergaya hidup yang kebarat-baratan, mengutamakan produk luar negeri, pada saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia raya tidak serius, menghormat bendera sang merah putih tidak dengan sikap tegap. Bentrok antar genk pelajar, karena terprovokasi isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna bahwa suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan

cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Dewasa ini justru nilai-nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang seharusnya diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara belum terlaksana dan justru terjadi banyak penyimpangan.

Nilai-nilai sila ke IV yang seharusnya diaktualisasikan dengan baik tetapi justru belum dilaksanakan dengan baik. Banyak penyimpangan yang terjadi diantaranya, adalah sikap mengutamakan voting dalam mengambil keputusan dan justru mengabaikan prinsip musyawarah untuk mufakat, dalam pengambilan keputusan tidak didasari sikap kekeluargaan tetapi justru egoisme pribadi dan golongan yang mengemuka, tidak ada etikat baik dan kurang bertanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan keputusan hasil musyawarah, dalam melaksanakan musyawarah didasari pikiran emosional, tidak berdasarkan akal sehat sesuai hati nurani yang luhur, dan keputusan yang diambil kurang dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan, tidak menjunjung tinggi harkat martabat manusia serta nilai kebenaran dan keadilan.

Secara khusus ada beberapa penyimpangan peserta didik terhadap sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ -perwakilan. Penyimpangan itu antara lain adanya para pelajar yang tidak menjalankan dan menghargai putusan bersama, kurang menghargai pendapat orang lain, dan mengutamakan egoisme pribadi atau kelompok.

Nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Persoalan yang muncul adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang seharusnya bisa dipahami dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara belum teraktualisasi dengan baik. Kenyataannya justru muncul sikap tidak adil, sikap ketidakmampuan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, sering adanya pemerasan terhadap orang lain, banyak orang bersikap boros dan bergaya hidup mewah, serta sikap bermalas-malasan.

Penyimpangan terhadap sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga dilakukan oleh para peserta didik. Penyimpangan itu diantaranya, adalah masih banyak peserta didik yang hanya menuntut hak dan mengabaikan kewajiban, senang berfoya-foya dan bergaya hidup boros, malas belajar dan tidak suka bekerja keras.

Indikasi secara umum dapat dilihat dengan munculnya kasus kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, tindak kekerasan, dan munculnya perilaku tidak terpuji (Mawardi, 2009). Di sisi lain Supriyoko (2003 : 3) menyatakan bahwa tidak sedikit generasi muda yang gagal menampilkan akhlak terpuji, sikap sopan santun, sifat ramah, tenggang rasa, rendah hati, suka menolong, solidaritas sosial, yang merupakan jati diri bangsa seakan akan sudah hilang dan tidak lagi melekat secara kuat dalam diri peserta didik.

Hal ini diperkuat oleh Samani dan Haryanto (2012 : 2) dan Muhajir (2011 : 34) yang menyatakan bahwa kenakalan remaja yang biasa terjadi, seperti pemerasan antar teman, kekerasan antar teman, penggunaan narkoba, tawuran antar pelajar, adalah demoralisasi di kalangan pelajar. Hal ini diakui atau tidak ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa perilaku pelajar sekarang kian bebas dan menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara serius dan tepat. Jika ini tidak ditangani secara serius dan tepat maka fenomena perilaku menyimpang di kalangan pelajar akan semakin meluas dan memprehatinkan.

Hal tersebut di atas menunjukkan, bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila belum dijalankan sesuai harapan. Menyikapi hal tersebut dipandang perlu untuk selalu mengupayakan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah. Hal ini sejalan dengan pemikiran Borba (2001 : 1) yang menyatakan, bahwa tanamkan buah pikiran, anda akan menuai tindakan, tanamkan tindakan, Anda akan menuai kebiasaan, tanamkan kebiasaan, anda akan menuai moral, tanamkan moral anda akan menuai keuntungan.

Kritikan dan sorotan tentang pendidikan di Indonesia tidak hanya masalah moral peserta didik yang masih jauh dari harapan. Kritikan dan sorotan itu muncul juga dalam proses pembelajaran, dimana pembelajaran di Indonesia cenderung menekankan aspek pengetahuan dan mengabaikan aspek sikap (Suyanto, 2003). Hal ini

berarti guru dalam penyampaian materi belum mengarah kepada penyampaian materi secara komprehensif.

Upaya untuk meningkatkan kualitas hasil belajar baik aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan banyak faktor yang mempengaruhi. Diantaranya adalah faktor guru. Guru harus kreatif dan inovatif dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Dalam Kurikulum 2013 menuntut partisipasi aktif dari seluruh peserta didik. Kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik tidak lagi berpusat pada guru. Oleh karena itu suasana kelas perlu dirancang dan dibangun dengan berbagai model pembelajaran yang tepat sehingga peserta didik memperoleh kesempatan untuk berinteraksi dengan teman yang lain secara baik sehingga pada akhirnya peserta didik memperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan secara utuh.

Dalam proses pembelajaran guru memegang peranan strategis dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Hal ini karena guru dalam proses pembelajaran tidak cukup berbekal pengetahuan yang berkaitan dengan materi yang diajarkan melainkan perlu memperhatikan aspek-aspek yang lain yang mendukung terwujudnya pengembangan potensi peserta didik. Peran guru dalam hal ini tidak bisa digantikan oleh pihak yang lain (Supriyadi, 1998).

Oleh karena itu, guru dalam mengajar seharusnya tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga harus memberikan nilai-nilai, sehingga pembelajaran yang berlangsung dapat menghasilkan pesan secara utuh baik secara pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Akhirnya peserta didik dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia-manusia yang berkepribadian (Sardiman, 2002).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas menunjukkan, bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan peserta didik masih rendah. Padahal internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan peserta didik menjadi hal yang mendasar dalam rangka untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Hal ini jika tidak segera teratasi maka akan terjadi kemerosotan moral di kalangan pelajar atau peserta didik yang berkelanjutan.

Kemerosotan moral di kalangan pelajar atau peserta didik yang berkelanjutan akan berdampak serius terhadap kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Karena pelajar merupakan generasi yang diharapkan mampu menerima dan melanjutkan estafet kepemimpinan di negeri ini. Tidak dapat kita bayangkan apa jadinya negeri ini jika nantinya dipimpin oleh generasi yang mempunyai sikap moral yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Hal inilah yang menjadi tantangan di era industry 4.0. oleh karena itu pendididkan nilai-nilai Pancasila menjadi salah satu alternatif jawaban untuk menselaraskan sikap kepribadian dengan kemajuan teknologi. Diyakini jika kemajuan teknologi diikuti sikap moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju dan bermartabat.

### **Isi Arti Pancasila Secara Utuh**

Isi arti Pancasila dapat dilihat dari isi arti Pancasila yang abstrak umum universal, isi arti Pancasila yang umum kolektif, dan

isi arti Pancasila yang khusus konkret (Suhadi, 2001). Istilah-istilah dalam sila-sila Pancasila adalah, Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Masing-masing terdiri atas kata dasar ditambah imbuhan “ke+an” untuk sila 1,2,4,5 dan imbuhan “per+an” pada sila 3. Menurut ilmu bahasa, kata dasar yang mendapat imbuhan “ke+an” menjadikan kata tersebut mempunyai arti yang bersifat abstrak. Sedang kata dasar yang mendapat tambahan imbuhan “ per+an” menjadikan kata tersebut mempunyai arti hal abstrak.

Berdasarkan hal tersebut maka istilah pokok dalam sila-sila Pancasila mengandung pengertian abstrak. Abstrak yang dimaksud adalah ada tetapi tidak nampak wujudnya, tidak dapat ditangkap dengan indra, hanya dapat ditangkap dengan roh kalbu, dan bersifat tetap tidak berubah. Di samping itu istilah-istilah pokok dalam sila-sila Pancasila mengandung pengertian yang bersifat umum universal. Pengertian yang bersifat umum universal maksudnya adalah umum seumumnya, tidak terbatas ruang dan waktu, tidak terikat oleh kelompok atau lingkungan tertentu, tidak terbatas oleh jumlah tertentu, dan bersifat tetap serta tidak berubah oleh keadaan, ruang dan waktu.

Menurut Notonagoro (1974), karena sila-sila Pancasila itu mempunyai pengertian yang bersifat abstrak dan memiliki pengertian yang bersifat umum universal, maka isi arti Pancasila yang bersifat abstrak umum universal itu bersifat tidak berubah, dan akan tetap melekat pada kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.



Inti isi sila ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ sebagai pengertian yang abstrak umum universal adalah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat Tuhan. Hakikat Tuhan adalah hanya ada satu dan selama-lamanya ada atau abadi, dzat yang mutlak, sempurna, kuasa, tak terbatas dan tidak berubah, pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta, dan wajib ditaati.

Inti isi sila ‘Kemanusiaan yang adil dan beradab’ sebagai pengertian yang abstrak umum universal adalah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat manusia. Adapun hakikat manusia itu adalah manusia makhluk momopluralis yang terdiri dari atas kodrat monodualis jiwa dan raga, sifat kodrat monodualis individu dan makhluk sosial dan kedudukan kodrat monodualis pribadi mandiri dan makhluk Tuhan.

Inti sila ‘Persatuan Indonesia’ sebagai pengertian yang abstrak umum universal, adalah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat satu. Adapun hakikat satu adalah mutlak tak dapat terbagi, mutlak terpisah dari hal lain, merupakan diri pribadi, suatu keseluruhan yang terpisah dari hal lain. Sebagai negara persatuan, maka Negara Republik Indonesia itu merupakan satu kesatuan, mutlak tidak dapat terbagi-bagi, mutlak terpisah dengan negara lain, bereksistensi tersendiri, mempunyai bentuk dan susunan serta sifat tersendiri.

Inti isi sila ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan’ sebagai pengertian yang abstrak umum universal adalah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat rakyat. Adapun hakikat

rakyat adalah keseluruhan jumlah orang warga dalam lingkungan daerah tertentu atau negara, segala sesuatunya meliputi semua warga dan untuk kepentingan seluruh warga, setiap warga memiliki hak-hak asasi kemanusiaan dan wajib-wajib asasi kemanusiaan.

Inti isi sila ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ sebagai pengertian yang abstrak umum universal adalah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat adil. Adapun hakikat adil adalah dipenuhinya sebagai wajib segala sesuatu yang merupakan hak dalam hubungan hidup kemanusiaan, lebih mengutamakan pemenuhan kewajiban dari pada menuntut pemenuhan hak.

Isi arti Pancasila yang umum kolektif adalah terbatas pada ruang dan waktu, terikat oleh kelompok atau lingkungan tertentu, dan terbatas oleh jumlah tertentu. Isi arti Pancasila yang umum kolektif merupakan penjabaran dari isi arti Pancasila secara abstrak umum universal yang berlaku secara umum namun terbatas pada suatu kolektifitas bangsa dan negara Indonesia.

Isi arti Pancasila secara umum kolektif secara formal tercantum di dalam berbagai ketentuan dan peraturan hukum maupun peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Antara lain tercantum dalam UUD 1945, Ketetapan-ketetapan MPR, dan Undang-Undang.

Isi arti Pancasila yang umum kolektif dari sila ‘Ketuhanan yang Maha Esa’ antara lain, negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah

menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, mewajibkan pemerintah dan para penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, tujuan pendidikan nasional antara lain mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan.

Isi arti Pancasila yang umum kolektif dari sila ‘Kemanusiaan yang adil dan beradab’, antara lain sebagai warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagai warga negara Indonesia wajib menjunjung hukum dan pemerintahan, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, kesetiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Isi arti Pancasila yang umum kolektif dari sila ‘Persatuan Indonesia’, antara lain adalah berkat perjuangan bangsa Indonesia terwujudlah negara Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat, negara melindungi bangsa dan tanah air dengan berdasar atas persatuan, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Isi arti Pancasila yang umum kolektif dari sila ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan’, antara lain negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, segala keputusan diusahakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, setiap putusan harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keikhlasan, kejujuran dan tanggung jawab.

Isi arti Pancasila yang umum kolektif dari sila ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’, antara lain negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, tujuan negara dan tugas pemerintah antara lain ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar keadilan sosial, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, warga negara bebas memilih pekerjaan yang dikehendaki, warga negara berhak untuk untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak milik perseorang diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat, pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata material maupun spiritual, setiap warga negara Indonesia berhak menikmati hasil-hasil pembangunan secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan dharma baktinya, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya

menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan kesejahteraan lahir batin yang lebih selaras adil dan merata, meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan lahir dan batin.

Isi arti Pancasila yang umum kolektif tersebut di atas adalah norma-norma umum yang merupakan pedoman pokok dan berlaku secara umum dalam suatu kolektifitas bangsa dan negara Indonesia. Agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya isi arti Pancasila yang umum kolektif harus dijabarkan lebih lanjut dan ditransformasikan ke dalam isi arti Pancasila yang khusus konkret.

Isi arti Pancasila yang khusus konkrit adalah isi arti Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan nyata yaitu menyesuaikan dengan keadaan, perkembangan zaman, peradapan manusia dan ipteks, namun tanpa menyimpang dari isi arti Pancasila yang umum kolektif maupun isi arti Pancasila yang umum abstrak universal. Isi arti Pancasila secara khusus konkrit banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.

Isi arti Pancasila yang khusus konkret dari sila 'Ketuhanan yang maha Esa', antara lain setiap mau berangkat ke sekolah berdoa dan sepulang dari sekolah memanjatkan syukur, menghindarkan diri dari perbuatan maksiat (berjudi, minum-minuman keras, memakai obat-obat terlarang), menghindarkan diri dari perbuatan tercela (mengumpat, menghujat dan memfitnah), tidak berbuat kerusakan di muka bumi (membakar hutan, menjarah barang, membunuh orang).

Isi arti Pancasila yang khusus konkret dari sila 'Kemanusiaan yang adil dan beradab' antara lain para siswa di

sekolah mengumpulkan dana dan sumbangan dari para dermawan untuk membantu bencana, mengikuti kegiatan kemanusiaan, donor darah, mencegah berbagai tindak kerusuhan, penjarahan, pengrusakan, pemerkosaan dan tawuran.

Isi arti Pancasila yang khusus konkret dari sila ‘Persatuan Indonesia’ antara lain dalam pergaulan sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengikuti berbagai kegiatan olah raga dan seni di sekolah, melakukan belajar kelompok/belajar bersama, bergaul dengan teman yang berbeda suku, agama dan tanpa memandang perbedaan apapun, berlatih menghimpun dalam suatu organisasi sekolah.

Isi arti sila Pancasila yang khusus konkret dari sila ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan’, antara lain semua siswa mengikuti pemilihan ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah, menghargai pendapat orang lain.

Isi arti Pancasila yang khusus konkret dari sila ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’, antara lain para siswa menyelenggarakan pasar murah sembako, memberikan bantuan kepada orang fakir miskin.

### **Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Internalisasi**

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki nilai-nilai luhur yang bersifat universal. Nilai atau *value* adalah keberhargaan dari kemampuan yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia (Kaelan, 1996). Atas dasar itu maka

dapatlah dikatakan bahwa nilai atau *value* adalah keberhargaan barang sesuatu atau yang ada pada barang sesuatu yang bersifat melekat pada barang sesuatu. Sesuatu itu dikatakan bernilai apabila sesuatu itu bermanfaat atau mengandung unsur-unsur kebermanfaatan karena benar, baik, indah, atau relegius. Untuk menentukan bernilai tidaknya sesuatu dilihat kesesuaiannya dengan unsur-unsur yang terdapat pada diri manusia, yakni unsur jasmani dan rokhani yang terdiri dari akal pikiran atau cipta, rasa, karsa dan keyakinan (Darmodihardjo, 1988). Pada kenyataannya yang bernilai itu tidak hanya benda-benda atau sesuatu yang bersifat materi belaka, melainkan segala sesuatu yang tidak berujud materi yang oleh Notonagoro (1974) disebut sesuatu yang bersifat immaterial.

Menilai berarti menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian diambil keputusan. Keputusan itu merupakan keputusan nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, indah atau tidak indah. Keputusan nilai yang dilakukan oleh subjek penilaian tentu berhubungan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia sebagai subjek penilai, yaitu unsur-unsur jasmani, akal, rasa, karsa dan kepercayaan. Sesuatu itu dikatakan bernilai apabila sesuatu itu berharga, berguna, benar, indah, dan baik. Di dalam nilai itu sendiri terkandung cita-cita, harapan-harapan, dan keharusan. Maka apabila kita berbicara tentang nilai sebenarnya kita berbicara tentang hal yang ideal, yakni hal yang menjadi cita –cita, harapan, dambaan dan keharusan.

Budiyono (2009) mengemukakan, bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai yang dapat dikembangkan dan digunakan sebagai pedoman untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada tiap sila Pancasila, adalah : Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, meliputi : (1). Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (2). Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing; (3). Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (4). Membina kerukunan hidup diantara sesama umat beragama dan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (5). Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya; (6). Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; (7). Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, mengandung nilai-nilai sebagai berikut : (1). Mengakui memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa; (2). Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa



membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit; (3). Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia; (4). Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira; (5). Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain; (6). Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan; (7). Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; (8). Berani membela kebenaran dan keadilan; (9). Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia; (10). Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Sila ketiga Persatuan Indonesia mengandung nilai-nilai : (1). Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan; (2). Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan; (3). Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa; (4). Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia; (5). Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; (6). Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika; (7). Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Sila keempat Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan mengandung nilai-nilai : (1). Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama; (2). Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain;

(3). Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama; (4). Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan; (5). Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah; (6). Dengan etika baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah; (7). Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan; (8). Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur; (9). Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama; (10). Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

Sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai : (1). Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan; (2). Mengembangkan sikap adil terhadap sesama; (3). Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban; (4). Menghormati hak orang lain; (5). Suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri; (6). Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain; (7). Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah; (8). Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum; (9).

Suka bekerja keras; (10). Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan bersama; (11). Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

### **Nilai-nilai Pancasila sebagai Suatu Sistem**

Isi arti sila-sila Pancasila pada hakikatnya dapat dibedakan atas, hakikat Pancasila yang umum universal yang merupakan substansi sila-sila Pancasila, sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yaitu sebagai dasar negara yaitu bersifat umum kolektif serta aktualisasi Pancasila yang bersifat khusus dan konkret dalam berbagai bidang kehidupan. Hakikat sila-sila Pancasila adalah merupakan nilai-nilai, sebagai pedoman negara adalah merupakan norma, adapun aktualisasinya merupakan realisasi konkret Pancasila.

Substansi Pancasila dengan kelima silanya yang terdapat pada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan merupakan prinsip dasar yang mengandung kualitas tertentu yang merupakan cita-cita dan harapan atau hal yang ditujukan oleh bangsa Indonesia untuk diwujudkan menjadi kenyataan riil dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Namun di samping itu, prinsip-prinsip dasar tersebut sebenarnya juga diangkat dari kenyataan riil. Prinsip-prinsip tersebut telah menjelma dalam tertib sosial, tertib masyarakat dan tertib kehidupan bangsa Indonesia, yang dapat ditemukan dalam adat istiadat, kebudayaan dan kehidupan keagamaan atau

kepercayaan bangsa Indonesia. Demikian pula, sesuai dengan isi yang terkandung di dalam Pancasila itu, yang mengandung tiga masalah pokok dalam kehidupan manusia Indonesia yaitu bagaimana “seharusnya”, manusia itu terhadap Tuhan, dirinya sendiri dan segala sesuatu di luar dirinya, maka dalam hal ini dapat diketahui adanya implikasi nilai-nilai nilai moral. Dengan demikian substansi Pancasila itu merupakan nilai, yang harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu norma dan selanjutnya direalisasikan dalam kehidupan nyata.

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila I sampai dengan sila V Pancasila merupakan cita-cita, harapan, dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya. Sejak dahulu nilai-nilai itu selalu didambakan, dicita-citakan bangsa Indonesia agar terwujud dalam masyarakat yang tata tentrem, karta raharja, gemah ripah loh jinawi, dengan penuh harapan diupayakan terealisasi dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia Indonesia. Driyarkara menyatakan bahwa bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan *Sein im Sollen*. Ia merupakan harapan, cita-cita, tetapi sekaligus adalah kenyataan bagi bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia dalam hal ini merupakan pendukung nilai-nilai (*subscriber of values*) Pancasila. Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan yang berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia menghargai, mengakui, menerima Pancasila sebagai sesuatu yang bemilai. Pengakuan, penghargaan dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bemilai itu akan tampak

mengejala dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan atau penghargaan itu telah mengejala dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia dan bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengemban dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia Indonesia.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu mempunyai tingkatan dan bobot yang berbeda, namun nilai-nilai itu tidak saling bertentangan, tetapi nilai-nilai itu saling melengkapi. Hal ini disebabkan sebagai suatu substansi, Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, atau kesatuan organik (*organic whole*). Dengan demikian berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh pula. Nilai-nilai itu saling berhubungan secara erat dan nilai-nilai yang satu tidak dapat dipisahkan dari nilai yang lain. Nilai-nilai yang ada itu, dimiliki bangsa Indonesia, yang akan memberikan pola (*patroon*) bagi sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia.

Pengertian Pancasila itu merupakan suatu sistem nilai dapat dilacak dari sila-sila Pancasila yang merupakan suatu sistem. Sila-sila itu merupakan kesatuan organik. Antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan secara erat. Dengan demikian, Pancasila itu merupakan suatu sistem dalam pengertian umum, dalam artian bahwa bagian-bagiannya (sila-silanya) saling berhubungan secara erat sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh (Kaelan, 2002).

Berdasarkan uraian mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila itu pula, tampak dengan jelas bahwa nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila termasuk dalam tingkatan nilai yang tinggi, dengan urutan sila Ketuhanan Yang Maha Esa menduduki tingkatan dan bobot nilai tertinggi, karena secara jelas mengandung nilai religius. Pada tingkatan di bawahnya adalah keempat nilai manusiawi dasar. Apabila keempat nilai manusiawi dasar itu akan diberikan tingkatan dan bobot nilainya, maka nilai kemanusiaan, tingkatan dan bobot nilainya layak dinyatakan berada di bawah nilai ketuhanan. Nilai keadilan sebagai salah satu nilai manusiawi dasar, dalam hubungannya dengan tingkatan dan bobot nilai kiranya harus diletakkan dalam tempat ketiga di bawah nilai kemanusiaan.

Namun, sesuai dengan sifat dasar bangsa Indonesia yang sangat menekankan kerukunan, maka nilai persatuan mempunyai tingkatan dan bobot nilainya, kiranya nilai persatuan mempunyai tingkatan dan bobot yang lebih tinggi dari nilai kerakyatan, karena nilai kerakyatan lebih merupakan sarana yang perlu untuk mencapai persatuan. Suatu hal yang diberikan penekanan adalah bahwa meskipun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu mempunyai tingkatan dan bobot yang berbeda namun antara nilai dalam sila-sila Pancasila saling dijiwai dan menjiwai.

### **Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila**

Secara etimologis internalisasi dapat diartikan sebagai proses penghayatan, pendalaman, dan penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui pembinaan dan bimbingan. Jika

internalisasi bisa dilakukan melalui proses pembinaan dan bimbingan, maka peran pendidikan nilai sangat penting.

Pendidikan nilai merupakan proses bimbingan melalui suri teladan yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai kehidupan yang di dalamnya mencakup nilai-nilai agama, budaya, etika, dan estetika menuju pembentukan peserta didik yang memiliki kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian yang utuh, berakhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara (Sumantri dalam Zakiah, 2014 : 199). Pendidikan nilai juga bisa diartikan sebagai bantuan kepada peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai serta menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya. Pendidikan nilai tidak hanya merupakan program khusus yang diajarkan melalui sejumlah mata pelajaran, tetapi mencakup pula keseluruhan proses pendidikan.

Lickona (1992) menyatakan, bahwa pendidikan nilai akan menghasilkan karakter. Ada tiga komponen karakter yang baik, yakni pengetahuan tentang moral (*moral knowing*), perasaan tentang moral (*moral feeling*), dan perbuatan moral (*moral action*). Ketiga komponen tersebut menunjuk pada tahapan pemahaman sampai pelaksanaan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Ketiganya tidak serta merta terjadi pada diri seseorang, melainkan bersifat prosedural. Artinya tahapan ketiga hanya mungkin terjadi setelah tercapai tahap kedua, dan tahap kedua hanya tercapai setelah tahapan pertama.

Kenyataannya ketiga tahapan tidak terjadi secara utuh, dimana ada orang hanya sampai *moral knowing* dan berhenti sebatas

memahami. Di sisi lain orang lain sampai pada tahap *moral feeling*, dan yang lain mengalami perkembangan dari *moral knowing* sampai *moral action*. *Moral knowing* adalah merupakan hal yang penting untuk diajarkan. *Moral knowing* terdiri dari enam hal, yaitu : 1). *Moral awareness* (kesadaran moral); 2). *Knowing moral value* (mengetahui nilai-nilai moral); 3). *Perspective taking*; 4). *Moral reasoning*; 5). *Decision making*; 6). *Self knowledge*.

Pendidikan nilai hanya sampai pada *moral knowing* tidaklah cukup, sebab sebatas pada tahu atau memahami tanpa mengamalkannya. Hal ini hanya akan menghasilkan orang-orang cerdas tetapi tidak bermoral. Maka amatlah penting pendidikan untuk dilanjutkan sampai pada *moral feeling*. *Moral feeling* adalah aspek lain yang harus ditanamkan kepada peserta didik yang merupakan sumber energi dari diri manusia untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Ada enam hal yang merupakan aspek emosi yang harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia yang bermoral, yaitu: *conscience* (nurani), *self esteem* (percaya diri), *empathy* (merasakan penderitaan orang lain), *loving the good* (mencintai kebenaran), *self control* (mampu mengontrol diri), dan *humility* (kerendahan hati).

Langkah yang amat penting dalam pendidikan nilai adalah *moral action*. *Moral action* adalah bagaimana membuat pengetahuan moral dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata. Tindakan moral ini merupakan hasil (*outcome*) dari dua komponen moral lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang



baik, maka harus dilihat dari tiga aspek lain, yaitu *competence* (kompetensi), *will* (keinginan), dan *habit* (kebiasaan).

Nilai secara etimologis berasal dari kata *Value* (Mustofa, 2011 : 15). Dalam kehidupan sehari-hari nilai merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Kartini dan Guno (2003 : 20) menyatakan bahwa nilai merupakan hal yang dianggap penting dan baik. Nilai merupakan referensi yang tercermin dari perilaku seseorang sehingga seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tergantung dari sistem nilai yang dipegangnya.

Linda dan Eyre (1997) menyatakan bahwa nilai adalah standar –standar perbuatan dan sikap yang menentukan siapa kita, bagaimana kita hidup, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Tentu saja nilai-nilai yang baik yang bisa menjadikan orang lebih baik, hidup lebih baik, dan memperlakukan orang lain secara lebih baik. Nilai tidak selalu sama bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena dalam masyarakat sering terdapat kelompok yang berbeda-beda. Masing-masing kelompok memiliki sistem nilai sendiri-sendiri. Maka jika terjadi konflik metode dialog merupakan solusi yang terbaik.

Hill (1991) berpendapat bahwa nilai sebagai acuan tingkah laku hidup manusia mempunyai tiga tahapan, yaitu : 1). *Values thinking*, yaitu nilai-nilai pada tahapan dipikirkan atau *values cognitive*; 2). *Values affective*, yaitu nilai-nilai yang menjadi keyakinan atau niat pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Pada tahap *values affective* meliputi *disposition* dan *commitments*; 3)

*Values actions*, yaitu tahap dimana nilai yang sudah menjadi keyakinan dan menjadi niat yang kuat diwujudkan menjadi suatu tindakan nyata atau perbuatan konkret.

Hal yang berkaitan dengan pembinaan peserta didik, ada tiga tahap, yaitu : (1). Tahap transformasi nilai. Tahap ini merupakan tahap penyampaian informasi nilai-nilai kepada peserta didik secara verbal; (2). Tahap transaksi nilai. Pada tahap ini dilakukan komunikasi dua arah antara guru dengan peserta didik; (3). Tahap transinternalisasi nilai. Pada tahap ini merupakan tahapan yang paling tinggi, dimana guru dituntut melakukan komunikasi secara utuh sampai pada tataran penghayatan dan penjiwaan nilai.

Menurut Notonagoro (1974), bahwa realisasi nilai-nilai Pancasila, perlu secara berangsur-angsur diwujudkan melalui pendidikan baik di keluarga, sekolah maupun dalam masyarakat, sehingga diperoleh hal-hal sebagai berikut: **(1)**. Pengetahuan, yaitu sedapat mungkin lengkap yaitu meliputi pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, dan pengetahuan filsafat tentang Pancasila. Hal ini sangat penting terutama bagi para calon pemimpin bangsa dan calon ilmuwan. Dalam proses transformasi pengetahuan ini diperlukan waktu yang cukup lama dan berkesinambungan, sehingga pengetahuan itu benar-benar dapat tertanam dalam setiap individu. Tanpa pendidikan yang cukup maka dapat dipastikan bahwa pemahaman tentang ideologi bangsa dan dasar filsafat negara hanya dalam tingkat-tingkat yang sangat pragmatis, dan hal ini sangat berbahaya terhadap ketahanan ideologi generasi penerus bangsa; **(2)**. Kesadaran. Setelah seseorang mempunyai pengetahuan

tentang Pancasila, maka seseorang harus mempunyai kesadaran akan apa yang akan dilakukan. Kesadaran merupakan sikap selalu mengetahui pertumbuhan keadaan yang ada dalam diri sendiri. Kesadaran seseorang menjadi pijakan untuk melakukan introspeksi terhadap dirinya sendiri. Jika seseorang memiliki kesadaran yang tinggi sebagai warga negara, maka akan muncul ketaatan terhadap bangsa dan negaranya; (3). Ketaatan, yaitu selalu dalam keadaan sedia untuk memenuhi wajib lahir dan batin, lahir berasal dari luar misalnya pemerintah, batin dari diri sendiri. Ketaatan merupakan tingkatan yang ketiga dalam proses internalisasi nilai-nilai Pancasila. Jika seseorang sudah memiliki pengetahuan tentang Pancasila dengan benar dan memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dalam diri seseorang akan muncul ketaatan terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila; (4). Kemampuan kehendak, yaitu keinginan mendasar dan mendalam yang cukup kuat sebagai pendorong untuk melakukan perbuatan. Jika seseorang sudah mempunyai kemampuan kehendak yang kuat untuk melakukan perbuatan, berarti motivasi internalnya cukup bagus. Hal ini akan memudahkan pemahaman, penghayatan dan penjiwaan nilai-nilai Pancasila yang akan diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku; (5). Watak dan hati nurani agar orang selalu mawas diri.

Hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh seseorang untuk mewujudkan watak dan hati nurani agar seseorang mawas diri, yaitu : (a). Dengan menilai diri sendiri apakah dirinya berbuat baik atau buruk dalam melaksanakan Pancasila dan memberi sanksi batin

yang berwujud pujian atau celaan kepada diri sendiri, atau sebelum melakukan perbuatan membuat pedoman Pancasila berupa perintah, larangan, anjuran atau membiarkan untuk berbuat/ tidak berbuat yang ditaatinya sendiri juga. Apabila tidak mentaati maka harus memberi sanksi batin berupa celaan terhadap diri sendiri; (b). Apabila telah melaksanakan maka akan diperoleh suatu kesiapan pribadi untuk mengamalkan Pancasila, yang selanjutnya akan merupakan suatu keyakinan tentang kebenaran; (c). Dengan demikian akan memiliki suatu ketahanan ideologi, sehingga dirinya akan merupakan sumber kemampuan, untuk memelihara, mengembangkan, mengamalkan, mewariskan, merealisasikan Pancasila dalam segala aspek kehidupan; (d). Jika setiap orang Indonesia telah memiliki kondisi yang demikian keadaannya maka setiap orang Indonesia akan berkepribadian, berwatak dan berhati nurani Pancasila sehingga akan terjelmalah negara dan masyarakat Pancasila.

Agar realisasi itu menjadi perbuatan dalam bentuk tindakan-tindakan yang tepat, maka harus dipikirkan dan dipelajari bentuk-bentuk pengamalan yang sesuai di berbagai bidang serta lingkungan. Pada dasarnya ada dua bentuk realisasinya yaitu bersifat statis dan yang bersifat dinamis. Statis dalam pengertian intinya, yaitu nilai-nilai yang abstrak umum universal karena sifatnya yang tetap dan tidak berubah. Bersifat dinamis dalam artian bahwa pengamalannya harus senantiasa menyesuaikan dengan perubahan, pertumbuhan dan perbedaan, tanpa meninggalkan persatuan dan kesatuan nasional.

## **Pengamalan Pancasila**

Pancasila tidak hanya harus dipahami, tetapi harus ada tindak lanjut sampai pada tataran internalisasi. Puncak internalisasi adalah tataran implementasi pada tindakan nyata. Oleh karena itu pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi sesuatu hal penting dan menjadi keharusan. Di era industry 4.0 merupakan era yang maju. Oleh karena itu sebagai bangsa yang besar bangsa Indonesia harus tetap berpedoman dan berdasarkan pada Pancasila secara utuh.

### **1. Kebutuhan Moral Untuk Mengamalkan Pancasila**

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia mengandung konsekuensi setiap aspek penyelenggaraan negara dan semua sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang bersumber pada hakikat Pancasila adalah bersifat abstrak umum universal, tetap dan tidak berubah. Nilai-nilai tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi norma-norma kenegaraan maupun norma-norma moral yang harus dilaksanakan dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia.

Oleh karena itu, permasalahan pokok dalam pengamalan Pancasila adalah bagaimana wujud pengamalan itu, yaitu bagaimana nilai-nilai Pancasila yang umum universal tersebut dijabarkan dalam bentuk norma-norma yang jelas dalam kaitannya dengan tingkah laku semua warga dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dalam kaitannya dengan segala aspek penyelenggaraan negara.

Selain itu dalam pengamalan Pancasila diperlukan juga suatu kondisi yang dapat menunjang terlaksananya pengamalan

Pancasila tersebut, baik dalam kondisi yang berkaitan dengan sikap setiap warga negara Indonesia dan wujud realisasi nilai-nilai Pancasila. Maka perlu disadari oleh setiap warga negara Indonesia bahwa dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara setiap warga negara memiliki sifat kodrat manusia bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Kesepakatan kita sebagai suatu kesepakatan yang luhur untuk mendirikan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila mengandung konsekuensi bahwa kita harus merealisasikan Pancasila itu dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan setiap sikap tingkah laku kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan lain perkataan bagi bangsa Indonesia mengamalkan Pancasila adalah merupakan suatu keharusan.

Di samping itu dalam pengamalan Pancasila juga didasarkan pada dorongan lahir dan batin sebagai berikut: (a). Bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia dijiwai oleh hasrat sedalam-dalamnya untuk mendirikan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dengan perjuangan yang berdasarkan pada hak kodrat maka harus diwujudkan kemerdekaan Indonesia, dan melanjutkan dalam suatu negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan idiologi Pancasila; (b). Pancasila adalah landasan ideal dalam perjuangan melawan penjajah. Selain Pancasila juga merupakan asas kerokhaniaan negara Indonesia, baik dalam rangka tujuan-tujuan nasional maupun internasional; (c). Bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan negara Indonesia pada hakikatnya berdasarkan atas suatu hukum dasar negara yang mengandung

suasana kebatinan dan cita-cita hukum. Hal ini berarti mewajibkan kepada penyelenggara negara, pemimpin pemerintah dan pemimpin rakyat untuk memiliki semangat yang dinamis guna memelihara budipekerti kemanusiaan yang luhur untuk merealisasikan suasana dan cita-cita hukum yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang berintikan asas kerokhanian Pancasila; (d). Bagi setiap warga negara Indonesia seharusnya mendasarkan cipta, rasa, karsa dan karya atas nilai-nilai Pancasila.

Pada hakikatnya memiliki pengetahuan saja bagi setiap warga negara Indonesia belum cukup. Oleh karena itu yang terpenting bagi kita adalah mengetahui, kemudian meresapi, menghayati, dan akhirnya mengamalkan Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Pengamalan Pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu, pengamalan Pancasila secara subjektif yaitu realisasi pada setiap individu, dan pengamalan secara objektif yaitu realisasi dalam segala aspek kenegaraan dan hukum ( Daroeso dan Suyahmo, 1989).

## **2. Pengamalan Pancasila Secara Subjektif**

Pengamalan Pancasila secara subjektif adalah pelaksanaan dalam pribadi perseorangan, setiap warga negaranya, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia. Pengamalan Pancasila secara subjektif ini justru yang lebih penting karena realisasi yang subjektif merupakan persyaratan bagi pengamalan Pancasila yang objektif (Notonagoro, 1975). Dengan demikian pengamalan Pancasila yang subjektif ini sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan serta kesiapan individu untuk

merealisasikan Pancasila. Dalam pengertian inilah pelaksanaan Pancasila yang subjektif yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan dimana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral. Sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib untuk melaksanakan Pancasila bukanlah hanya akan menimbulkan akibat hukum namun yang terlebih penting lagi akan menimbulkan akibat moral. Dalam pengertian inilah maka fenomena konkret yang ada pada seseorang yang berkaitan dengan sikap dan tingkah laku seseorang dalam realisasi Pancasila secara subjektif disebut moral Pancasila. Maka Pengamalan Pancasila bersifat subjektif ini lebih berkaitan dengan kondisi objektif, yaitu berkaitan dengan norma-norma moral.

Dalam pengamalan Pancasila yang bersifat subjektif ini bilamana nilai-nilai Pancasila telah dipahami, diresapi dan dihayati oleh seseorang maka seseorang itu telah memiliki moral pandangan hidup. Bilamana hal ini berlangsung secara terus-menerus sehingga nilai Pancasila telah melekat dalam hati sanubari bangsa Indonesia maka kondisi yang demikian disebut dengan kepribadian Pancasila. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia telah memiliki suatu ciri khas, sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

Bilamana pengertian ini diterapkan pada bangsa Indonesia sebagai kelompok manusia Indonesia, pengertian kepribadian ini dapat dikembalikan kepada hakikat manusia. Telah diketahui bahwa segala sesuatu itu memiliki tiga macam hakikat yaitu: (1). Hakikat abstrak, yaitu terdiri dari unsur-unsur yang bersama-sama menjadikan halnya itu ada, dan menyebabkan sesuatu yang sama



jenis menjadi berbeda bangsa jenis lain. Misalnya jenis manusia, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu hakikat abstrak bersifat abstrak, umum universal; (2). Hakikat pribadi, yaitu memiliki ciri-ciri yang khusus, yang tetap melekat pada sesuatu sehingga membedakan sesuatu itu dengan yang lainnya. Bagi bangsa Indonesia hakikat pribadi inilah yang disebut kepribadian, dan hakikat pribadi ini merupakan penjelmaan dari hakikat abstrak; (3). Hakikat konkret, adalah hakikat segala sesuatu dalam menyatakan konkret, dan hakikat ini merupakan penjelmaan dari hakikat abstrak dan hakikat konkret.

Oleh karena itu bagi bangsa Indonesia, pengertian kepribadian Indonesia ini memiliki tingkatan yaitu: (a). Kepribadian yang berupa sifat-sifat hakikat kemanusiaan ‘monopluralis’, jadi sifat-sifat kemanusiaan yang abstrak umum universal. Dalam pengertian ini disebut dengan kepribadian kemanusiaan karena termasuk jenis manusia, dan memiliki sifat-sifat kemanusiaan; (b). Kepribadian yang mengandung sifat-sifat kemanusiaan yang telah terjelma dalam sifat-sifat khas kepribadian Indonesia, yakni kepribadian Pancasila dan ditambah dengan sifat-sifat yang tetap yang terdapat pada bangsa Indonesia, sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain; (c). Kepribadian kemanusiaan, kepribadian Indonesia dalam realisasi konkretnya, setiap orang, suku bangsa, memiliki sifat-sifat tidak tetap, dinamis tergantung pada keadaan, situasi dan kondisinya. Dalam pengertian yang ketiga ini sebagai realisasi konkret sehingga bersifat tidak tetap (Notonagoro, 1971)

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pengamalan subjektif dari Pancasila, meliputi pelaksanaan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan dalam pelaksanaan konkretnya tercermin dalam tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari

### **3. Pengamalan Pancasila Secara Objektif**

Pengamalan Pancasila secara objektif, adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dan semua bentuk bidang kenegaraan dan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Hal itu antara lain dirinci sebagai berikut : (a). Tafsir Undang-Undang Dasar 1945, harus dilihat dari sudut dasar filsafat negara Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinie IV; (b). Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 dalam Undang-undang harus mengingat dasar-dasar pokok pikiran yang tercantum dalam dasar filsafat negara Indonesia; (c). Tanpa mengurangi sifat-sifat Undang-Undang yang tidak dapat di ganggu gugat, interpretasi pelaksanaannya harus mengingat unsur-unsur yang terkandung dalam filsafat negara; (d). Interpretasi pelaksanaan Undang-Undang harus lengkap dan menyeluruh, meliputi seluruh perundang-undangan di bawah Undang-Undang dan keputusan-keputusan administrasi pusat sampai dengan alat-alat perlengkapan negara di daerah, keputusan-keputusan pengadilan serta alat perlengkapannya begitu juga meliputi usaha kenegaraan dan rakyat; (e). Dengan demikian seluruh hidup kenegaraan dan tertib hukum Indonesia didasarkan atas dan

diliputi oleh asas politik dan tujuan negara yang berdasarkan atas dan diliputi asas kerokhanian Pancasila.

Hal ini termasuk pokok kaidah negara serta pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 juga didasarkan atas asas kerokhanian Pancasila. Bahkan yang terlebih penting lagi adalah dalam realisasi pelaksanaan konkretnya yaitu dalam setiap penentuan kebijaksanaan di bidang kenegaraan, antara lain : (1). Hukum dan perundang-undangan serta peradilan; (2). Pemerintahan; (3). Politik dalam dan luar negeri; (4). Keselamatan, keamanan dan pertahanan; (5). Kesejahteraan; (6). Kebudayaan; (7). Pendidikan; (8). Reformasi dan segala pelaksanaannya (Kaelan, 1993).

### **Wacana Akhir**

Saat sekarang kita memasuki era Industri 4.0 mau tidak mau, suka tidak suka sebagai bangsa Indonesia harus siap. Kesiapan itu harus ditunjukkan dengan berbagai tindakan nyata. Jika tidak, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang tertinggal dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia memiliki pandangan hidup dan dasar negara, yakni Pancasila. Disadari atau tidak Pancasila mampu mempererat dan mempersatukan bangsa ini.

Sebagai penyeimbang dan penyelaras kemajuan era industry 4.0, maka pendidikan nilai Pancasila sebagai salah satu kuncinya. Oleh karena itu Pancasila harus dipahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui pemahaman yang utuh terhadap Pancasila, melalui penjiwaan secara

mendalam dalam setiap sanubari, dan melalui pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari kita yakini dapat digunakan sebagai modal dalam mengemabngkan bangsa ini menjadi bangsa yang mempunyai jati diri, maju dan bermartabat yang tidak akan lapuk dengan terjangan era apapun. Hal ini disebabkan Pancasila mempunyai nilai dasar yang permanen dan kuat serta nilai instrumen yang akan mampu mengikuti perkembangan zaman.

### **Referensi**

- Budiyono, K. (2009). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Bandung : Alfabeta.
- Darmodihardjo, D. (1988). *Pancasila suatu Orientasi Singkat*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Daroeso, B. & Suyahmo. (1989). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta : Liberty.
- Hill, B.V. (1991). *Value Education in Australian School*. Melbourne : Radford House.
- Kaelan, M.S. (1993). *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta : Paradigma.
- \_\_\_\_\_ (2002). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta : Paradigma.
- Kartini, K & Guno. (2003). *Kamus Psikologi*. Bandung : Pioner Jaya.
- Lickona, Th. (1992). *Educating for Character, How our school can teach respect and responsibility*. New York : Holt, Renichart and Wiston.
- Linda, R. & Eyre, R. (1997). *Mengajarkan Nilai-Nilai kepada Anak* (Terjemahan Alex Tri Kartono Widodo). Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.

- Mawardi, L. (2009). *Evaluasi Pendidikan Nilai, Perkembangan Moral Keagamaan Mahasiswa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Muhaimin. (2002). *Paradigma Pendidikan Islam : Upaya mengefektifkan pendidikan agama islam di sekolah*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, A. (2011). *Ilmu Pendidikan Perspektif Kontekstual*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Mustofa, M. (2011). *Konstruksi Filsafat Nilai : Antara normativitas dan realitas*. Makasar : Alaudin Pers.
- Notonagoro. (1971). *Pengertian Dasar bagi Implementasi Pancasila untuk ABRI*. Jakarta : Departemen Pertahanan dan Kemanan.
- \_\_\_\_\_ (1974). *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta : Pantjuran Tudjuh.
- \_\_\_\_\_ (1975). *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta : Pantjuran Tudjuh.
- Samani, M. & Haryanto. (2012). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sardiman, A.M. (2002). *Interaksi dan Motivasi Belajar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Suhadi. (2001). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : Yayasan pembinaan Fakultas Filsafat UGM.
- Supriyadi, D. (1998). *Isu dan Agenda pendidikan tinggi di Indonesia*. Jakarta : PT. Rosda Jaya Putra.
- Supriyoko. (2003). *Menuju Masyarakat Tertib Damai Salam Bahagia sebagai Karakter Bangsa Masa Depan*. Yogyakarta : Makalah. 19-20 Mei 2003.

Suyanto. (2003). *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Melenium ke tiga*. Yogyakarta : Adi Cita Karya Nusa.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Zakiah, Q. Y. & Rusdiana. (2014). *Pendidikan Nilai, Kajian Teori dan Praktek*. Bandung : Pustaka Setia.

# **Makna RI 4.0 bagi Pertanian**

Dr. Ir.Dewi Ratna Nurhayati, MP.  
dewiratna201163@gmail.com

Indonesia suatu negara yang luas banyak gugusan pulau dan dikenal sebagai negara agraris dengan posisi lintasan khatulistiwa menjadikan Indonesia sangat menguntungkan sekali apabila ditinjau dari faktor klimatologis dalam menunjang aktivitas bercocok tanam. Bicara mengenai revolusi industri di Indonesia, maka perlu kita tengok ke belakang terlebih dahulu. Seantero dunia juga sudah mengakui bahwa berjalannya waktu ke waktu tentu saja akan membawa suatu komitmen suatu bangsa untuk beradaptasi dengan seiring merebaknya teknologi.

Awal mula terjadinya revolusi industri di dunia pada abad 17 saat itu ditandai dengan revolusi besar-besaran di berbagai bidang seperti pertanian, manufaktur, pertambangan, dan transportasi, salah satunya adalah keberadaan mesin uap. Secara bertahap peran manusia atau hewan seutuhnya yang masih terbatas mulai berangsur tergantikan hadirnya mesin. Walaupun pada awalnya sedikit ditentang oleh kasta pekerja, namun mereka merasakan lebih terbantu dalam efisiensi jumlah beban pekerjaan.

Berjalannya waktu setelah dirasa bidang-bidang tersebut berjalan dengan optimal, segala industri semakin berkembang dengan pesat. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dinamika dalam mengembangkan keperluan berbagai industri sehingga telah mendorong proses energi yang menunjang setiap mesin berjalan

dengan semestinya. Permasalahan listrik, gas, air dan telegraf jadi awal setelah industri tahap rentang tahun 1850 – 1940. Saat itu listrik mulai ditemukan, perkembangan pipa gas, air dan alat komunikasi. Kondisi tersebut dirasakan dengan hadirnya revolusi industri kedua. Di bidang pertanian telah terjadi konversi lahan, pergiliran tanaman, pemuliaan tanaman.

Selanjutnya terjadi revolusi industri lanjutan sebagai revolusi industri ke tiga yang sering disebut revolusi teknologi. Di bidang pertanian telah menerapkannya revolusi hijau, ditandai dengan teknologi rekayasa kimia dan genetika ditandai dengan adanya varietas tanaman pangan unggul, aneka macam pupuk serta upaya menerapkan mekanisasi pertanian di berbagai tahap kepentingan bidang budidaya pertanian, misalnya menanam bibit padi, memanen sayur, kentang dan mencuci rhizoma hasil panen budidaya tanaman obat. Sehingga meringankan tenaga kerja.

Hadirnya mesin kontrol, ponsel genggam dan komputer telah disadari bahwa manusia memasuki era baru setelah mesin yakni era teknologi. Sangat bermanfaat bagi seluruh kalangan dan berbagai khalayak, mulai dari pekerjaan penulisan, pendataan, pengetikan data, dokumen dari berbagai bidang diluar pertanian bahkan bidang pertanian itu sendiri, dimudahkan dengan hadirnya komputer. Demikian halnya dengan bidang komunikasi, dimana sangat diperlukan oleh masyarakat secara umum dalam melakukan komunikasi setiap saat dengan teman, keluarga handai taulan tanpa harus ke anjungan telepon umum tanpa mengantri. Cukup menggunakan ponsel pribadinya.



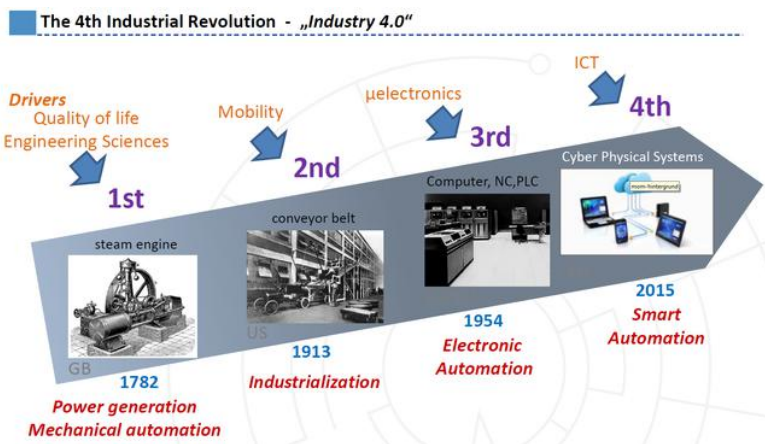
Kemunculannya mulai lahir di akhir abad 19, saat ini era tersebut terjadi perubahan besar yang mengarahkan manusia ke arah digital mengawali RI 4.0. Hidup di era industri keempat, diawali dari revolusi internet yang bukan hanya sebagai mesin pencari, namun lebih dari itu semua bisa terhubung dengan cerdas, sistem fisik fiber, dan robotik. Dengan semakin bertambah majunya era Revolusi industri kita tidak perlu panik bahkan khawatir maupun berdiam diri dengan adanya era digital karena sudah menjadi suatu hal nyata yang harus dihadapi sehingga kita bisa menyesuaikan perkembangan jaman.

Namun, di bidang pertanian perlu hal tersebut disikapi dengan memilah dan memilih aplikasinya untuk berbagai segi penggunaan, mengapa? Karena Indonesia secara menyeluruh daerahnya masih heterogen selaras dengan wilayah yang luas berupa gugus kepulauan hingga mencapai luas 1,9 juta km<sup>2</sup>. Ditinjau dari segi keperluan tentu saja pulau satu dengan yang lain berbeda kondisinya dalam menyerap kehadiran teknologi pada revolusi industri, apalagi RI.4.0. Maka tak heran apabila masih terjadi kebebasan dalam menerapkan teknologi di era disrupsi ini.

Sebagai contoh pelosok desa di wilayah P Jawa (daerah Klaten, Purwodadi, Kebumen dan lain), bahkan Luar jawa (NTB, Sulawesi, Irian, Kalimantan) pengguna teknologi digital juga menyesuaikan kebutuhan yang akan diterapkan guna dalam menjalankan aktivitas budidaya pertanian hingga pasca panennya. Sebagai contoh pelosok Irian Jaya masih menggunakan peralatan tradisional dalam budidaya ubi jalar maupun sagu, demikian halnya

di Pelosok Kalimantan, Sulawesi. Namun, untuk wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah ada yang memerlukan sentuhan teknologi menggunakan model digital untuk keperluan pemupukan dan pemberantasan hama atau penyakit dalam areal yang luas dengan pengendalian remote control dan CPU.

## Bagan Perjalanan Era Disrupsi



Dari perjalanan teknologi dapat dilihat di bagan tersebut. Semua itu adalah dasar dari kecerdasan buatan yang ada di sekitar kita dan sedang berlangsung saat ini. Ada tiga bidang jadi dasarnya yaitu: fisikal, digital, dan biologikal. Untuk bidang fisikal terdiri atas autonomasi kendaraan, 3D Printing, dan perkembangan robotik. Bidang digital ada kemajuan dari *Internet of Things* (IoT) dan bidang biologik yaitu proses rekayasa genetik buatan.

Menghadapi Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan persaingan ketat dan arus informasi yang pesat pada semua sektor, daya saing yang kuat bagi Indonesia agar mampu mensejajarkan diri dengan negara-negara lain sangat diperlukan. Inovasi merupakan kunci dalam peningkatan produktifitas berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas inovasi di era Revolusi Industri 4.0.

Kiprah perguruan tinggi perlu melakukan juga melalui reorientasi kurikulum agar tetap relevan dengan perkembangan zaman sehingga “Perlu ada reorientasi kurikulum di perguruan tinggi. Kurikulum di perguruan tinggi harus mengacu pada pembelajaran dalam teknologi informasi, ‘*internet of things*’, ‘big data’ dan komputerasi, serta ‘entrepreneurship’. Bahkan di Faperta Unisri ‘internship’ menjadi kurikulum wajib. Ini akan menghasilkan lulusan terampil dalam aspek literas data, literasi teknologi dan literasisumber daya manusia. Dalam realitanya Pertanian tak mungkin bisa mencukupi kebutuhan penduduk yang terus bertambah tanpa teknologi. Sehingga perlu ditingkatkan produktivitas pertanian dengan meluncurkan Revolusi Industri 4.0 di bidang pertanian untuk menjawab tantangan.

Hal-hal yang menjadikan hambatan dalam mengembangkan bidang pertanian di Indonesia diantaranya adalah :

- a. Alih fungsi lahan sehingga semakin sempitnya lahan pertanian karena berubah fungsi dari lahan pertanian

menjadi tanah komersial atau perumahan yang dilakukan pengembang

- b. Perubahan cuaca yang tidak dapat prediksi yang membuat petani sering gagal panen karena tiba-tiba hujan dan banjir sehingga panen pun harus dipercepat
- c. Regenerasi anak muda yang ingin jadi petani semakin berkurang karena dianggap bahwa pekerjaan di bidang pertanian tidak mensejahterakan.
- d. Tanah yang berkurang tiap tahun sekitar 96,500 Ha karena petani menjual tanahnya kepada pengembang
- e. Berkurangnya atau hilangnya sumber-sumber pertanian tanpa adanya diversifikasi pangan

Pelaku bidang pertanian hendaknya mencari solusi dan harus secepatnya membuat strategi untuk mentransformasikan kekuatan yang berimplikasi besar guna mengikuti berjalannya disrupsi. Dengan berani memulai tidak hanya mengandalkan aktivitas secara manual artinya petani bisa tidak lagi mempersiapkan media tanam atau masa tanam, perawatan lahan (pencegahan hama gulma maupun penyakit), pembajakan, pemilihan bibit, persemaian dengan pola lama yaitu menggunakan tangan dan kaki, tetapi sudah harus memulai digantikan dengan alat pertanian modern.

Penggunaan traktor dan teknologi GPS akan mengoptimalkan pertanian karena ketepatan pertanian dapat dihasilkan. Melalui monitor dan kontrol semua hal dapat diukur

dengan sangat tepat dan cepat. Melalui pembiasaan pengembangan digital agriculture dalam bentuk pengembangan teknologi dan pengenalan alat-alat produksi dan mesin-mesin dalam produksi. Sementara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, Fakultas Pertanian mendorong peran aktif mahasiswa dalam mengakses sumber informasi terkini melalui akses ke jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta ketersediaan modul pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan aktor atau pemain baru di sektor pertanian kalangan generasi milenial yang dianggap memiliki karya inovasi dan berani menghadapi ketidakpastian sektor pertanian.

Dengan mengajak anak-anak muda lulusan sarjana pertanian mengambil peluang dengan menjadikan era disrupsi sebagai peluang dan kesempatan menjadi pemain di dalamnya bukan sebagai penerima manfaat sehingga akan tertinggal dan terpinggirkan.

### **Referensi:**

Okezone. *Pertanian tak mungkin bisa mencukupi kebutuhan penduduk yang terus bertambah tanpa teknologi - Sektor Riil - okezone economy*. 30 Agustus 2019

UGM. *Ekosistem Digital di Era Revolusi Industri 4.0 Sektor Pertanian* [www.ugm.ac.id](http://www.ugm.ac.id) › berita › 18364-ekosistem-digital, 28 SEPTEMBER 2018

# Kebijakan “*Making Indonesia 4.0*” sebagai Langkah Membangun *Society 5.0*

Halifa Haqqi, S.IP., M.A.  
Halifahhaqqi@gmail.com

Revolusi Industri 4.0 mendorong siapa pun untuk terjun ke dalam arena pertarungan era disrupsi, entah sebagai individu, perusahaan maupun negara. Persaingan berlangsung di berbagai sektor, tanpa kecuali. Di bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, hingga politik, menunjukkan bahwa siapapun yang siap dengan penguasaan teknologinya, dialah yang akan bertahan. Produktivitas ditentukan tidak hanya dari seberapa besar kerja keras kita, melainkan dari seberapa mampu kita mengandalkan teknologi. Ini adalah inti dari bangunan *society 5.0* yang membuat manusia tidak terjajah teknologi, tapi teknologi ada untuk kemajuan manusia.

Secara fundamental, era disrupsi telah menggeser pola relasi yang terjadi antar manusia di dunia dan mendorong perubahan pada relasi internasional dalam berbagai *track* diplomasi. Ketika kita mengamati sektor ekonomi, kita dapat melihat lahirnya pola perdagangan baru dengan ramainya *e-commerce* hingga penggunaan uang digital. Cara-cara manusia dalam berbisnis berubah dengan mengandalkan pada kecanggihan teknologi digital. Di bidang sosial, interaksi menjadi seolah tanpa batas. Kegiatan sosial dikampanyekan lewat daring, begitu pula pertemanan dan jejaring sosial semakin menggaung. Rapat hingga negosiasi terjadi tanpa mengenal jarak dan waktu. Interaksi dan akulturasi berbagai entitas

budaya membaur melompati batas negara melalui dunia maya (Prasetyo, Trisyanti, 2018).

Di bidang politik, masyarakat global semakin melek politik. Jika dulu masyarakat cenderung abai dengan masalah politik, kini masing-masing individu dengan mudah bertindak layaknya pengamat politik profesional hanya dengan informasi yang dikantongi dari internet dan media sosial. Berita-berita politik tersebar dan dengan mudah diakses sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berpolitik. Kondisi ini menegaskan bahwa ekonomi politik global tak mampu lepas dari pengaruh Revolusi Industri 4.0.

Pada kondisi seperti ini, pemerintah sebagai entitas politik perlu menyesuaikan diri. Menjadi suatu keniscayaan bagi organisasi pemerintah untuk bertransformasi, menyesuaikan diri di berbagai ruang lingkup dengan segala kompleksitasnya. Negara harus mampu hadir bersama berbagai kebijakan yang diambil sehingga responsif terhadap perubahan. Sebab, kompleksitas peradaban era disrupsi bisa menjadi peluang, tantangan sekaligus ancaman, tergantung dari seberapa siap kita menghadapinya. Pertanyaan yang perlu dipecahkan adalah, apakah negara akan kalah dengan RI 4.0, atau memenangkannya dengan membangun *society* 5.0 yang kokoh.

Kata kuncinya adalah kesiapan. Bagi suatu negara, bersiap dengan kebijakan-kebijakan baru yang adaptif akan lebih menguntungkan, alih-alih menolak hadirnya era ini. Bagaimana pun juga, perkembangan zaman adalah hal yang tak bisa ditolak. Menghindarinya adalah hal yang percuma, atau justru bisa

merugikan. O'Reilly (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kehadiran teknologi 4.0 bisa sangat menguntungkan, dengan syarat kita bisa mengenali dan memanfaatkannya. Dengan teknologi 4.0, berbagai pekerjaan manusia bisa menjadi lebih ringan dan lebih mudah. Aneka pekerjaan bisa berlangsung lebih optimal, sehingga jelas ini bisa memberi keuntungan. Teknologi 4.0 mendukung manusia untuk bisa lebih produktif dalam berbagai hal.

Ketua Eksekutif WEF (World Economic Forum), Profesor Klaus Schwab juga menyatakan dalam bukunya “The Fourth Industrial Revolution” bahwa “*The Fourth Industrial Revolution, finally, will change not only what we do but also who we are. It will affect our identity and all the issues associated with it: our sense of privacy, our notions of ownership, our consumption patterns, the time we devote to work and leisure, and how we develop our careers, cultivate our skills, meet people, and nurture relationships.*” (Trailhead, 2019).

Profesor Schwab menegaskan bahwa revolusi industri telah mengubah banyak hal. Cara manusia hidup, bekerja dan berkomunikasi berubah. Pemerintahan dengan pola barunya juga harus menyesuaikan diri untuk ini. Zaman Cyber-Fisik “*The Cyber-Physical Age*” inilah yang mengubah cara-cara manusia dalam menjalani kehidupannya. Mekanisme input-proses-output dalam sistem politik pun memiliki polanya yang baru. Pemerintah dengan *e-government*-nya dapat mengupayakan kehadiran *good government* melalui integrasi teknologi dan ketersediaan *big data*.



Semua ini mungkin terjadi karena hampir seluruh aspek kehidupan manusia terhubung dari dunia fisik menuju dunia maya.

Bahkan olahraga yang biasa mengandalkan gerakan fisik pun, kini menjelma dalam bentuk *e-sport*. Inilah era manusia zaman siber fisik. Dunia yang penuh dengan perkembangan teknologi. Jika merujuk pada pencapaian ilmu pengetahuan, dunia teknologi berkembang dengan luar biasa pesat sehingga menghasilkan jumlah paten yang luar biasa. Hasil studi European Patent Office pada 2017 lalu berhasil mencatat adanya peningkatan jumlah paten teknologi di seluruh dunia. Setidaknya, dalam tiga tahun terakhir terjadi peningkatan hingga 54 persen pada jumlah paten yang diajukan terkait Revolusi Industri 4.0. Hanya saja, sejauh mana kontribusi Indonesia dalam peningkatan paten ini?

Tingginya paten teknologi menegaskan bahwa integrasi yang terjadi antara kehidupan fisik manusia dengan teknologi semakin intens. Bahkan, David Stubbs, Kepala Strategi Investasi Klien untuk EMEA di JP Morgan Private Bank, dalam surat elektronik kepada CNBC menegaskan bahwa teknologi, khususnya teknologi digital telah terkait dengan aneka bisnis serta kehidupan sosial dan ekonomi manusia. Memisahkan teknologi dari kehidupan non teknologi, ataupun memisahkan *lifestyle* manusia dan teknologi, merupakan hal yang mustahil. Hal ini juga berlaku dalam peran politik yang tak mungkin lepas dalam mendorong penciptaan *society* 5.0 yang apik.

Untuk bisa memenangkan era ini, tentu saja masing-masing negara harus berbenah melalui cara-caranya sendiri. Politik dan

kebijakan yang dilahirkan pemerintah harus mampu mengakomodir kebutuhan sesuai era ini. Kanselir Jerman, Anggella Markel, di tahun 2015, dalam acara World Economic Forum (WEF), mendengungkan gagasan Revolusi Industri 4.0 hingga kemudian gagasan ini terus menjadi bahasan menarik dalam setiap pertemuan forum ekonomi. Jerman sendiri telah menggelontorkan dana sebesar €200 juta yang ditujukan untuk mendukung para akademisi, pemerintah, dan pebisnis melakukan penelitian lintas akademis terkait Revolusi Industri 4.0. Ini adalah langkah Jerman untuk bersiap membekali negara dalam menyambut RI 4.0.

Amerika Serikat juga termasuk negara yang sadar dan bersiap menghadapi RI 4.0. Pemerintah Amerika Serikat melangkah dengan menggerakkan *Smart Manufacturing Leadership Coalition* (SMLC), sebuah organisasi nirlaba yang merupakan gabungan dari para produsen, pemasok, perusahaan teknologi, lembaga pemerintah, universitas dan laboratorium. SMLC digerakkan agar mampu memajukan cara berpikir masyarakat luas dalam menyambut Revolusi Industri 4.0 (Baenanda, 2018). Amerika telah belajar dari sejarah bahwa revolusi selalu melahirkan perubahan yang signifikan dalam sistem politik, sistem ekonomi dan struktur sosial (Schwab, 2016).

Sementara itu, Professor Klaus Schwab menjabarkan dampak sistemik yang dapat terjadi terhadap masyarakat, industri, perusahaan dan negara akibat RI 4.0. Revolusi melahirkan perubahan pada pola interaksi dalam hal kecepatan, keleluasaan juga kedalaman pemikiran. Perubahan besar kali ini adalah perubahan

yang disruptif. Disruptif karena terjadi peleburan antara dunia fisik dan digital sehingga seolah membingungkan.

Secara fisik, aneka produk hasil revolusi industri terus bermunculan, seperti kendaraan tanpa pengemudi, mesin cetak 3D, *advanced robotics*, dan material baru lainnya. Berbagai temuan ini tidak berdiri sendiri, melainkan menyatu dengan berbagai arteri kehidupan manusia. Jadi, peleburan antara dunia fisik dan digital adalah nya (Nugraha, 2017). Di sinilah pentingnya pemahaman akan pembangunan society 5.0, sehingga kehadiran RI 4.0 bisa optimal dalam mendukung kemajuan manusia melalui skema *human centered*.

Dalam kondisi seperti ini, jelas terdapat tantangan politik dan aturan baru yang harus dimiliki oleh setiap pengambil kebijakan. Kebijakan tersebut setidaknya harus dapat memuat standarisasi dalam beberapa hal seperti: (1) Keterampilan teknis; (2) Keterampilan koding; (3) Pemahaman proses; (4) Keamanan data dan privasi; (5) Pemahaman keamanan teknologi informasi. Untuk mendukungnya, juga perlu dibuat skema kebijakan yang mampu memastikan adanya kepatuhan terhadap pemenuhan standar ini.

Dalam jurnalnya, Irianto (2017) menyederhanakan tantangan industri 4.0 dalam beberapa aspek, meliputi: (1) kesiapan industri; (2) tenaga kerja terpercaya; (3) kemudahan pengaturan sosial budaya; dan (4) diversifikasi. Tantangan inilah yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk mendukung eksistensi dunia industri. Selanjutnya, perlu usaha dalam penciptaan lapangan kerja sehingga dapat menangkap peluang industri 4.0 yang bertebaran,

seperti: (1) inovasi ekosistem; (2) basis industri yang kompetitif; (3) investasi pada teknologi; serta (4) integrasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan kewirausahaan<sup>1</sup>.

Bagi Indonesia, menyeleraskan kebijakan ini dengan kebutuhan dan kondisi adalah hal penting. Pemerintah perlu membuat kebijakan berdasarkan input yang tepat. Berbagai kondisi dan kesiapan harus dinilai secara akurat sehingga dapat melahirkan kebijakan secara tepat demi upaya membangun *society* 5.0. Adanya prediksi akan bonus demografi yang dinikmati Indonesia pada tahun 2030-2040 tentu juga perlu dipertimbangkan secara matang. Bonus demografi yang dimaksud berarti Indonesia memiliki jumlah penduduk dengan usia produktif lebih banyak dibanding usia penduduk non produktif.

Diperkirakan, jumlah penduduk usia produktif pada tahun-tahun tersebut mencapai 64% dari total penduduk Indonesia, atau 297 juta jiwa (Yusuf, 2019). Banyaknya penduduk usia produktif ini tentu dapat dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah misalnya bisa menyiapkan skema kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas bagi SDM Indonesia, baik dari sisi pendidikan, keterampilan, dan bekal wawasan serta kemampuan bersaing di pasar global. Untuk bisa mendapatkan SDM yang unggul jelas tidak bisa didapat dengan cara instan.

Oleh karena itu, terdapat pula urgensi untuk melakukan transformasi organisasi pemerintah. Akuntabilitas publik serta transparansi harus segera diwujudkan demi menjawab tuntutan dan tantangan perkembangan era Revolusi Industri 4.0. Organisasi

pemerintah harus mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat secara cepat. Responsifitas yang tinggi akan membantu pemerintah dalam mengolah input yang diperoleh, agar mampu diproses secara tepat dan menghasilkan output yang tepat pula.

Perjalanan sistem politik sangat ditentukan dari pola organisasi pemerintahan yang ada di dalamnya. Pola yang tepat bukan berarti harus terukur dengan besarnya organisasi dan struktur organisasi yang gemuk, juga tidak terletak pada rentang kendali yang besar. Dalam era disrupsi, dibutuhkan transformasi organisasi sehingga menjadi lebih adaptif terhadap perubahan yang berlangsung begitu cepat. Jadi, organisasi pemerintah dapat menghasilkan output yang sesuai guna menjawab fenomena *tomorrow is today*. Daya adaptif inilah yang bisa mengantarkan Indonesia meraih peluang dalam era disrupsi ini.

Tatanan politik dan pemerintah adalah yang paling krusial karena akan berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Bahkan, relasi organisasi bisnis juga bergantung pada bagaimana pemerintah menata stabilitas politik dan kebijakan pendukungnya. Arus globalisasi dan Revolusi Industri 4.0 yang melaju dengan begitu deras, adalah dinamika yang perlu terus diperhatikan dan dipelajari oleh organisasi pemerintah. Transformasi organisasi pemerintah harus terus menerus diarahkan untuk membangun integrasi, kolaborasi dan sinergitas berbagai pihak.

Era kini, kreativitas tidak seharusnya terkungkung oleh hirarki yang ketat dalam sebuah organisasi. Dibutuhkan adanya perubahan struktur organisasi, proses komunikasi dan koordinasi

yang membuat hambatan-hambatan struktural menghilang. Struktur organisasi pemerintah yang selama ini bersifat mekanistik, hierarkis birokratis, serta departemental, dengan karakter yang kaku, formalisasi tinggi serta sentralistik, tidak lagi sesuai. Era Revolusi Industri 4.0 adalah era ketika informasi mengalir dengan bebas serta formalitas menjadi rendah. Struktur organisasi dibentuk oleh tim lintas fungsi sehingga mampu menjawab ketidakpastian yang tinggi. Sementara lingkungan strategis organisasi pemerintah harus mampu bertindak secara dinamis dengan kompleksitas permasalahan yang tinggi.

Bagi Indonesia, berbagai kondisi ini harus dipelajari dan disimak secara mendalam. RI 4.0 pasti akan berdampak bagi Indonesia. Karenanya, menangkap kondisi ini sebagai input dalam perpolitikan adalah langkah bijak. Beruntung, pemerintah Indonesia telah menangkap sinyal ini dengan jelas. Indonesia telah merangkum berbagai sinyal yang berhasil ditangkap dan memprosesnya untuk menghasilkan output berupa program "*Making Indonesia 4.0*", yang secara khusus digarap oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Kebijakan ini setidaknya menunjukkan bahwa pemerintah telah memetakan target yang hendak diraih secara sistematis dalam *roadmap* "*Making Indonesia 4.0*" yang diluncurkan pada 4 April 2018. Dalam peta jalan tersebut, telah termuat gagasan terkait pememanfaatan sektor Industri 4.0 yang bisa ditempuh oleh Indonesia. Harapannya, Indonesia mampu meraih peluang dengan

menciptakan lapangan kerja secara luas dengan perluasan investasi berbasis teknologi.

Dalam skema kebijakan tersebut, Indonesia menetapkan sepuluh target untuk menyongsong Revolusi Industri 4.0, dalam bentuk 10 prioritas nasional “Making Indonesia 4.0”, berupa:

1. Perbaiki alur aliran material

Langkah ini dilakukan dengan cara memperkuat produksi material sektor hulu. Semisal dengan mengoptimalkan 50% dari bahan baku petrokimia yang masih impor.

2. Mendesain ulang zona industri

Dilakukan dengan membangun peta jalan zona industri nasional, misal pada *industry belts*; serta dengan mengatasi permasalahan yang dihadapi di beberapa zona industri.

3. Akomodasi standar sustainability

Dilakukan dengan membuka kesempatan daya saing melalui tren *sustainability global*, sebagai contoh EV, biofuel, energi terbarukan.

4. Pemberdayaan UMKM

Dilakukan dengan usaha memberdayakan 3.7 juta UMKM di Indonesia melalui teknologi, misalnya *e-commerce* UMKM serta dengan pendanaan teknologi.

5. Membangun infrastruktur digital nasional

Dilakukan melalui pembangunan jaringan dan platform digital, seperti pengembangan jaringan 4G menjadi 5G, Serat optik 1Gbps, Data center dan Cloud.

6. Menarik investasi asing

Dilakukan dengan menargetkan perusahaan manufaktur terkemuka global agar berinvestasi di Indonesia melalui penawaran yang menarik dan insentif untuk percepatan transfer teknologi.

7. Peningkatan kualitas SDM

Dilakukan dengan melakukan desain kembali kurikulum pendidikan dengan menyesuaikan era Industry 4.0, serta dengan program *talent mobility* untuk profesional.

8. Pembentukan ekosistem inovasi

Dilakukan dengan pengembangan sentra R&D oleh Pemerintah, swasta, publik, maupun universitas.

9. Menerapkan insentif investasi teknologi

Dilakukan dengan usaha memperkenalkan *tax exemption/* subsidi untuk adopsi teknologi dan dukungan pendanaan.

10. Harmonisasi aturan dan kebijakan

Dilakukan dengan melakukan harmonisasi kebijakan dan peraturan lintas kementerian (Budiman, 2019).

Konsep yang dinamai “Making Indonesia 4.0” ini mengusung usaha revitalisasi sektor manufaktur Indonesia. “Making Indonesia 4.0” menjadi langkah inisiatif sebagai bukti bahwa Indonesia tak ingin tertinggal dalam gegap gempira global dalam menyambut kehadiran Revolusi Industri keempat, serta dalam membangun Society 5.0 yang berorientasi *human centered*. Pemerintah Indonesia memberikan tanggapan nyata dengan peluncuran program ini. Ada deretan target fantastis yang ingin



dicapai oleh Indonesia beserta seluruh masyarakatnya, yang salah satunya adalah untuk mencapai posisi 10 ekonomi terbesar dunia tahun 2030.

Tentu saja, target tersebut bukan hal mudah. Meluncurkan sekedar program dan target tidak bisa memberi jaminan bahwa target itu akan tercapai. Dibutuhkan kebijakan yang menyeluruh, komprehensif dan saling tersinergi antar berbagai lembaga sebagai organisasi pemerintah. Gotong royong pemerintah dan masyarakat pun harus terbangun beriringin. Untuk bisa mencapai langkah tersebut, setidaknya ada beberapa hal yang harus dicapai Indonesia, seperti:

- Mencapai 10% kontribusi Ekspor Netto terhadap PDB. Level ini pernah dicapai Indonesia di tahun 2000 silam. Mencapai level ini akan memungkinkan ekonomi Indonesia terus membaik.
- 2 kali peningkatan produktivitas terhadap biaya. Indonesia menargetkan dapat meningkatkan produksi melalui pengelolaan biaya, seperti yang dilakukan dengan perkembangan di India.
- 2% pengeluaran R&D terhadap PDB. *Research and Development* dianggap sebagai skema penting dalam pengembangan industri 4.0. Untuk itu, Indonesia harus mampu membangun kemampuan inovasi lokal, setidaknya setingkat dengan China (AT Kearney, 2016).

Beberapa target yang disebutkan di atas adalah rangkuman program revitalisasi sektor manufaktur. Sektor manufaktur inilah yang secara langsung terdampak terhadap kebijakan Making Indonesia 4.0. Sektor ini menjadi target utama karena memang bersentuhan erat dengan dunia teknologi. Dengan pencapaian ini, Indonesia juga akan mampu membuka pasar tenaga kerja yang lebih luas. Pasar tenaga kerja yang luas, berarti kemampuan dalam persaingan ekonomi global juga meningkat.

Ekonomi yang meningkat berarti kekuatan ekonomi negara juga akan lebih baik. Selanjutnya, pemerintah akan mampu meningkatkan belanja negara untuk berbagai kepentingan, seperti meningkatkan stabilitas ekonomi, politik, sosial hingga pertahanan dan keamanan. Ini adalah langkah yang mengantarkan pada kekokohan Indonesia akan terbentuk dengan mengandalkan perkembangan dan stabilitas dari berbagai sektor, baik mikro maupun makro. Alhasil, pencapaian negara dalam persaingan ekonomi global di era disrupsi ini bisa sesuai harapan. Setidaknya, Indonesia bisa mencapai target untuk masuk dalam 10 ekonomi terbesar dunia di tahun 2030.

Namun, kembali lagi, berbagai target ini hanya akan bisa tercapai bila sinergi yang berlangsung antara pemerintah dan masyarakat berlangsung baik. Berbagai tatanan dan kebijakan lain juga harus bisa terkonsep dan terlaksana dengan baik secara komprehensif. Tak lupa, komitmen organisasi pemerintah untuk bersikap adaptif juga harus kuat. Tanpa itu semua, bonus demografi maupun skema “Making Indonesia 4.0” mungkin tidak bisa

mengantarkan Indonesia menempati posisi 10 ekonomi terbesar dunia.

### Referensi:

Banu Prasetyo dan Umi Trisyanti. 2018. *REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN TANTANGAN PERUBAHAN SOSIAL*, Prosiding SEMATEKSOS 3 "Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0"

Trailhead. 2019. *Understand the Impact of the Fourth Industrial Revolution on Society and Individuals*, diakses dari <https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/impacts-of-the-fourth-industrial-revolution/understand-the-impact-of-the-fourth-industrial-revolution-on-society-and-individuals>

Listhari Baenanda. 2018. *Mengenal Lebih Jauh Revolusi Industri 4.0*, diakses dari <http://binus.ac.id/knowledge/2019/05/mengenal-lebih-jauh-revolusi-industri-4-0/>

Klaus Schwab. 2016. *The Fourth Industrial Revolution*. Geneva : Word Economic Forum.

Dadan Nugraha. 2017. *Transformasi Sistem Revolusi Industri 4.0*, dalam makalah Workshop Technopreneurship "Road to TBIC 2019", 30 September 2018

Yusuf, 2019, *Dari Bonus Demografi, Digital Talent Scholarship, Hingga Palapa Ring*, diakses dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/16370/dari->

bonus-demografi-digital-talent-scholarship-hingga-palapa-  
ring/0/artikel

Prof. Dr. Arief Budiman. 2019. *Kolom pakar: Industri 4.0 vs Society 5.0*, diakses dari <http://ft.ugm.ac.id/kolom-pakar-industri-4-0-vs-society-5-0/>

AT Kearney. 2016. *Making Indonesia 4.0*, World Bank.

# ***Youtube* menjadi Tempat Belajar Masa Kini**

Haryo Kusumo Aji, S.I.Kom., M.I.Kom.  
haryokusumoaji@yahoo.com

## **Mengapa Youtube?**

Sudah menjadi kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi seluruh warganya karena pendidikan adalah hak setiap warga negara. Namun dengan perkembangan teknologi, memungkinkan bentuk pendidikan tidak lagi terbatas di ruang kelas, namun dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Munculnya internet di dunia merubah paradigma tentang pendidikan yang awalnya hanya di dalam kelas menjadi pendidikan yang tak terbatas tempat. Segala arus informasi dapat diperoleh melalui media massa dan internet dengan mudah dan cepat. Gerbner berpendapat bahwa media massa menanamkan nilai dan sikap tertentu. Media juga turut menyebarkan sikap dan nilai itu kepada anggota masyarakat yang lain (Nurudin, 2004:159).

*Youtube* yang adalah salah satu media sosial berbasis video telah menjadi media yang paling populer untuk mengunduh atau mengunggah video. Pada umumnya, video di *Youtube* adalah video klip musik, laporan peristiwa, berita, film, TV, dan video buatan para penggunanya sendiri yang disebut kreator. Selain itu, *Youtube* juga menampilkan video suatu peristiwa yang diunggah oleh masyarakat awam atau disebut amatir.

Sudah semakin banyak materi-materi pembelajaran yang dibuat praktek dan direkam menggunakan video kemudian

disebarkan di *youtube*. Hal ini menjadikan belajar tidak hanya bisa dilakukan oleh orang yang menempuh pendidikan formal, namun dengan bermodalkan *gadget* dan internet dapat memperoleh pendidikan alternatif melalui *youtube*.

Oleh karena itu penting untuk melihat bagaimana persepsi pengguna, yang dalam hal ini adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi saat menggunakan *youtube* sebagai media belajar alternatif masa kini. Mahasiswa dianggap sudah mampu untuk menggunakan media *youtube* secara bijak dan tepat sesuai kebutuhan. Demikian juga melihat pembelajaran yang diperoleh mahasiswa di dalam perkuliahan terkadang kurang cukup untuk mempraktekkan teori yang sudah diperoleh.

Persepsi adalah proses dimana sensasi yang diterima oleh seseorang dipilih dan dipilih, kemudian diatur dan kemudian diinterpretasikan (Prasetijo, 2005:67). Menurut Jenifer Foller persepsi adalah proses mental yang digunakan untuk mengenali rangsangan (Mulyana, 2007 :180). Persepsi juga didasarkan pada kebudayaan, yaitu didasarkan pada kepercayaan dan pemahaman individu berdasarkan kebudayaan mereka (Liliweri, 2011: 155).

Alex Sobur membagi proses persepsi menjadi 3 tahap, yaitu: seleksi, interpretasi dan reaksi: (Sobur, 2003:446) (1) Seleksi, adalah proses penyaringan rangsangan dari luar oleh indra, jumlah dan jenisnya dapat lebih banyak atau lebih sedikit. (2) Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Dalam fase ini rangsangan yang diterima selanjutnya diorganisasikan dalam suatu bentuk. Interpretasi dipengaruhi oleh

beberapa faktor, yakni pengalaman masa lalu, nilai yang dianut, motif, kepribadian dan kecerdasan. Namun, persepsi juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengkategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana.

Reaksi, yaitu tingkah laku setelah berlangsung proses seleksi dan interpretasi. Jadi, persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi dan pembulatan terhadap informasi yang sampai serta melakukan reaksi atas informasi tersebut.

## **Motif**

Motif bisa berbeda antara seseorang walaupun kegiatan yang dilakukan sama. Motif seorang yang melakukan kejahatan, di mata hukum dapat mempengaruhi vonis yang dijatuhkan. Bahkan motif ini dapat menjadi acuan seorang dalam memutuskan suatu perkara. Ketika seseorang menggunakan media massa dalam berekspresi ataupun aktualisasi diri maka ada motif yang melatarbelakanginya dan bisa bermacam-macam tergantung dari individu itu sendiri.

Berawal dari kurang adanya contoh riil dalam sebuah pembelajaran, maka mahasiswa menggunakan *youtube* sebagai media berbasis *audio-visual* untuk mencari contoh dari suatu informasi atau pembelajaran. Kemudian juga untuk menambah wawasan dari sebuah teori atau pengetahuan tertentu dan menambah keterampilan, karena melalui *youtube* dijelaskan secara *audio-visual* sehingga bisa langsung dipraktekkan dan cepat untuk dipahami.

Mahasiswa beranggapan bahwa melihat melihat video tutorial menggunakan sebuah video lebih efektif dan mudah dimengerti daripada hanya sekedar membaca.

### **Faktor Eksternal**

Terdapat faktor lain di luar motif dari dalam diri seseorang dapat juga mempengaruhi atau menarik minat seseorang dalam menyaksikan video di *youtube*. Macam-macam faktor eksternal bisa berupa *interaktivitas, portabilitas, shareable*, dan lain-lain. Faktor eksternal ini bisa memungkinkan seseorang memiliki ketertarikan untuk melihat *youtube* lebih besar daripada faktor inner itu sendiri, karena begitu banyak dan menariknya tampilan dan kegunaan yang bisa terwujud dari media sosial ini, sehingga kebutuhan itu bisa diciptakan.

Mahasiswa komunikasi menggunakan *youtube* ini karena sesuatu yang memudahkan dalam mencari informasi. Mudahnya akses yang disediakan situs ini menjadi daya tarik tersendiri sehingga mahasiswa tidak memerlukan usaha besar dalam mencari sebuah informasi. Tersedianya aplikasi khusus yang terbenam dalam *gadget* yang dimiliki oleh mahasiswa menjadikan situs ini lebih mudah lagi untuk diakses dan dijangkau.

Pengguna yang dalam hal ini adalah mahasiswa mendapat informasi tentang *youtube* salah satunya karena fitur *share* yang dilakukan oleh teman mahasiswa lain. Kemudahan di dalam membagikan informasi pembelajaran yang didapat menjadi nilai tersendiri untuk menggunakan *youtube* sebagai media belajar di



masa kini. Tampilannya yang lebih atraktif daripada hanya sekedar membaca buku cetak memang menjadi daya tarik tersendiri.

## **Nilai**

Masyarakat yang menggunakan *youtube* pasti memiliki latar belakang yang beraneka ragam juga. Oleh karena itu, latar belakang seseorang sedikit banyak akan mempengaruhi nilai apa yang dianut selama ini, karena apa yang dianggap penting, benar dan salah tergantung dari apa yang sudah dialami selama ini. Penilaian tentang video di *youtube* juga berbeda-beda antar individu.

Video bermanfaat sebagai penambah informasi yang menyajikan cara-cara seperti *tutorial* atau cara-cara melakukan sesuatu memberikan perspektif yang berbeda tentang media sosial, dimana sebelumnya *youtube* hanya dianggap sebagai tempat hiburan saja, namun berubah nilai menjadi tempat untuk belajar dan sarana edukasi alternatif disamping buku cetak atau perkuliahan di dalam kelas.

Pengguna *youtube* yang dalam hal ini adalah mahasiswa pasti memiliki maksud ketika melihat tayangan *youtube*, yaitu salah satunya adalah untuk menambah pengetahuan, seperti seorang akademisi seharusnya. Hal ini yang menjadi nilai kegunaan yang dicari, yaitu pengetahuan dan informasi. Disamping itu juga dalam mencari nilai kepuasan, mahasiswa juga menggunakan media ini untuk sarana hiburan karena banyak segi hiburan yang ditawarkan oleh stage ini.

## **Pengalaman**

Sebagian mahasiswa mendapat video dari *youtube* karena mengetahui informasi dari seorang teman, tetapi ada juga yang mencari tahu sendiri. Kemudian setelah mendapatkan video yang tepat maka mahasiswa akan mencari *channel* dari tayangan tersebut. Mahasiswa kemudian mengikuti (*subscribe*) *channel youtube* yang sesuai dengan minat mereka, yaitu mencari informasi dan pembelajaran dengan cara yang mudah dan menarik. Mahasiswa menganggap dengan mengikuti sebuah *channel youtube* tertentu akan lebih mudah mendapatkan pembaruan dari video yang di transfer, sehingga informasi yang didapat juga semakin cepat diperoleh.

Penonton *youtube* berasal dari latar belakang mahasiswa komunikasi, maka sebagian besar pengguna lebih mencari video pembelajaran atau tutorial yang berkaitan dengan minat atau konsentrasi perkuliahan, yaitu tentang sinematografi, fotografi, editing video, animasi, dan lain sebagainya. Mahasiswa memang di dalam perkuliahan sudah mendapatkan materi dan tugas tentang sinematografi dan sejenisnya, dan ada beberapa teknik dalam praktek yang belum dimengerti, maka akan mencari cara-cara mudah melalui *channel* yang fokus kepada tutorial sinematografi yang baik.

## **Kebudayaan**

Budaya individu menjadi salah satu variabel yang menjadi tolok ukur seseorang dalam menilai dan mencari suatu tayangan.

Beberapa bagian dari latar belakang kebudayaan bisa terdiri dari: kepercayaan dari seseorang dan pemahaman dari seseorang tentang sesuatu hal. Dalam hal ini, pengguna berasal dari kalangan akademisi yang berkebangsaan Indonesia, oleh karena itu memiliki keterbatasan dalam penguasaan bahasa sehari-hari. Bahasa yang digunakan di dalam percakapan adalah bahasa Indonesia sehingga akan ada kesulitan pemahaman jika mendapatkan informasi tertentu menggunakan bahasa asing.

Melihat latar belakang tersebut mahasiswa lebih memilih untuk mengikuti video tutorial belajar yang menggunakan bahasa Indonesia atau yang dibuat oleh orang Indonesia. Sekalipun menurut informan *channel* dari negara asing lebih lengkap dan lebih detail dalam menyampaikan informasi juga memiliki trik-trik khusus dalam memberikan pelatihan, namun kesulitan dalam menerjemahkan bahasa adalah hal yang akan terjadi, sehingga harus tetap mencari dengan latar belakang bahasa dan budaya yang sama dengan informan.

Melihat latar belakang budaya pendidikan di Indonesia yang lebih banyak mengajarkan teori daripada praktek, mahasiswa harus belajar mengimplementasikan teori menjadi praktek dengan melihatnya dari *youtube*. Sudah banyak *channel youtube* yang memang khusus menyajikan cara penggunaan suatu alat atau praktek dari suatu metode tertentu. Pemahaman mahasiswa mengenai suatu pengetahuan atau teori membuatnya harus mencari informasi dengan sumber lain yang mudah untuk dipahami dan dipraktikkan, yaitu dengan media video dimana merupakan fasilitas

dari *youtube* karena dirasa gambar video lebih dapat mudah dipahami daripada hanya sekedar materi secara tertulis di buku dan lisan di dalam kelas atau perkuliahan.

## **Harapan**

Harapan dari pengguna terhadap konten video di *youtube* bermacam-macam. Harapan ini dibentuk dari informasi yang sudah didapat dari pengalaman sebelumnya. Banyaknya video untuk belajar yang dibuat baik itu dalam negeri maupun luar negeri membuat pengharapan tertentu dari mahasiswa, yaitu salah satunya adalah semakin diperbanyak membuat konten untuk pembelajaran dan semakin dibuat menarik, sehingga akan mudah untuk mempraktekkan dalam implementasi sehari-hari maupun guna memahami penggunaan dari teori yang sudah diajarkan di dalam pendidikan formal.

Diharapkan seorang *content creator* menyajikan trik-trik khusus yang lebih mudah dipahami dalam sebuah pembelajaran tertentu, dimana trik ini dapat digunakan supaya mahasiswa dapat mempraktekkan materi lebih cepat dan mudah. Lalu seharusnya tidak banyak basa-basi di dalam penyampaian dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

Harapan dari pengguna *youtube* yang dalam hal ini sebagai akademisi adalah supaya *content creator* memperbanyak tayangan yang memiliki konten edukasi sehingga media ini dapat digunakan sebagai media alternatif dalam belajar di masa kini, karena dapat diakses dari mana saja dan kapan saja serta tidak memerlukan

banyak biaya. Lalu dari sisi penonton atau *viewer* harus bijak dan tepat dalam memilih *channel youtube* yang memang bermanfaat untuk saran penunjang belajar, tidak hanya sekedar hiburan namun dapat memberikan manfaat yang positif.

### **Referensi:**

Liliweri, Alo.2011. KOMUNIKASI : Serba Ada Serba Makna.  
Jakarta: Kencana

Mulyana, Dedy.2009.*Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung :  
PT. Remaja Rosdakarya

Nurudin. 2004. *Pengantar Komunikasi Massa*. Malang : Cespur

Prasetijo, Ristiyanti.2005.*Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Andi  
Offset

Sobur, Alex. 2003. *Psikologi Umum*. Bandung : Pustaka Setia

# ***New Media* di Era Disruptif**

Andri Astuti Itasari, S.Sos., M.I.Kom.  
Andriastutiitasari@gmail.com

Era disruptif bisa dikatakan sebagai pergeseran suatu inovasi yang semula menggunakan metode sederhana menuju perubahan metode yang lebih modern. Era disruptif disini menggantikan teknologi lama menjadi teknologi digital dimana dengan teknologi digital ini menghasilkan teknologi yang lebih praktis dan berdaya guna bagi masyarakat. Era disruptif ini menawarkan kepada masyarakat Indonesia untuk bermigrasi ke media baru (*new media*), sehingga aktivitas masyarakat di era disruptif ini bisa diartikan mengalami pergeseran atau beralihnya aktivitas di dunia nyata bergeser ke dunia maya. Kemudahan yang diperoleh di masa ini memberikan perubahan besar pada berbagai sektor di masyarakat baik di bidang pendidikan, ideologi, politik, industri, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial, budaya maupun di bidang yang lainnya, sehingga menghasilkan kebaruan, kreatif dan inovatif. Adapun ciri-ciri era disruptif ini ditandai dengan perkembangan teknologi komunikasi, munculnya generasi milenial, adanya kebutuhan pola pikir eksponensial dan era *internet of things* atau *IOT* (Webinar STMM, 2020).

Indonesia saat ini sudah berada di era *society 4.0*, meskipun masih ada beberapa daerah yang masih berada di *society 3.0*. Era *society 4.0* merupakan suatu era dimana peradaban berpusat pada

teknologi. Era *society 4.0* juga bisa dikatakan sebagai *information and knowledge society*. Pemerintah Indonesia diharapkan selalu mengembangkan dan berinovasi agar era disruptif ini dirasakan dan terjangkau oleh banyak orang, sehingga kesejahteraan inovasi bisa tercapai dengan baik. Peran dan posisi pemerintah untuk mengembangkan dan memfasilitasi di era ini yang selalu dinantikan masyarakat karena mengingat masa ini adalah masa dimana dunia selalu mengalami perubahan besar, sehingga masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan, sebab hanya mereka yang mampulah yang dapat bertahan di tengah perubahan yang sangat cepat. Masa peradaban untuk beradaptasi pada dunia digital atau digitalisasi inilah yang dinamakan era disruptif, sehingga siapapun menikmati dari perubahan media baru di era disruptif ini. Kita mau tidak mau harus melewati tantangan di era digital ini dengan pikiran yang positif karena tantangan di era digital ini menuntut kita bisa cepat beradaptasi terhadap perubahan yang tidak pasti dan lingkungan sendiri membutuhkan kita untuk cepat mengambil sikap dengan situasi yang tidak menentu, sehingga lingkungan menjadi sangat dinamis dan saling ketergantungan pada kondisi ini.

Pemanfaatan teknologi modern merupakan salah satu tanda dari era disruptif saat ini. Kehadiran media internet merupakan bagian dari pemanfaatan teknologi. Media internet merupakan representasi dari media baru (*new media*). Zarella (2010) mengemukakan bahwa media sosial merupakan paradigma media baru dalam konteks industri pemasaran. Internet ini sebagai media sosial, dimana sebuah komunikasi di dunia maya diciptakan dalam

memenuhi kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain untuk bisa saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik. Dengan media internet ini manusia dapat membangun hubungan sosial di kalangan lapisan masyarakat, sehingga jejaring sosialpun terjalin erat.

Perkembangan media baru yang semakin pesat dan berkembang memunculkan teknologi informasi, dimana mendorong tumbuhnya komunikasi, sehingga perkembangan teknologi ini mempengaruhi kehidupan manusia. Karena pada dasarnya manusia itu tidak bisa untuk tidak berkomunikasi. Hal ini tentunya memiliki banyak alasan mengapa manusia itu berkomunikasi. Manusia memiliki naluri untuk mengkomunikasikan tentang pikiran dan perasaannya terhadap orang lain. Komunikasi ini bisa dilakukan secara tatap muka baik verbal maupun non verbal. Manusia tidak hanya berkomunikasi secara tatap langsung, tetapi bisa melalui media komunikasi. Kehadiran media baru ini memberikan pencerahan untuk ruang berkomunikasi yang bisa dikatakan lebih kekinian karena pengaruh transformasi digital yang tak terelakkan untuk era saat ini, sehingga media baru telah menggabungkan dunia teknologi dan kehidupan sosial untuk berinteraksi.

Ruesch & Beteson (1961) dalam Santoso, Setiansah (2010) mengemukakan bahwa komunikasi itu tidak semata-mata merujuk pada transmisi pesan verbal, eksplisit dan intensional tetapi bisa meliputi segala proses seseorang akan mempengaruhi yang lainnya. Era disruptif menawarkan berbagai macam media baru secara digitalisasi yang beraneka ragam agar masyarakat bisa untuk



berkomunikasi satu dengan yang lain. Media internet seperti media sosial secara nyata menyediakan berbagai macam aplikasi agar masyarakat memiliki ruang untuk berinteraksi dan memperoleh informasi secara cepat dan global, sehingga wajah masyarakat masa kini di era disruptif dikatakan lebih maju dibandingkan masa sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa informasi dan telekomunikasi berperan penting dan nyata. Kehadiran media baru atau *new media* di era disrupsi telah mengubah dunia dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan sehingga berpengaruh terhadap perubahan di bidang komunikasi dan perilaku komunikasinya. Berbeda ketika disandingkan sebelum ada media baru, dimana masyarakat masih menggunakan media konvensional seperti radio, televisi maupun media cetak yang hanya terdapat audio, visual dan teks, sedangkan di media baru (*new media*) menawarkan media online atau digital dengan fasilitas *multi channel*, *multi platform* dan *multi plexing*.

Media sosial atau akun di dunia maya beserta aplikasinya sebagai contoh media baru, dimana berkembang sangat pesat di era disruptif. Media sosial sangat mudah diakses karena pada dasarnya sebagai media untuk mempermudah berinteraksi dan berkomunikasi. Media internet menawarkan ruang dan waktu untuk setiap manusia berkomunikasi satu sama yang lain. Tetapi yang perlu diperhatikan juga tentang pesan yang disampaikan di media sosial ini, haruslah pesan dengan kata-kata yang bijak dan mendidik. Little john, Foss, Oetzal, 2015 mengemukakan bahwa berkomunikasi tetap melihat bagaimana pesan itu disusun dan disampaikan, kata – kata dan

simbol yang terkandung dalam pesan, serta bagaimana pesan tersebut diartikan karena media sosial ini sangat berperan besar pada komunikasi seperti pada bagaimana cara menyampaikan pesan, menerima pesan maupun cara memaknai pesan. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa berkomunikasi di dunia maya memberikan kenyamanan dan lebih efektif untuk berinteraksi, sehingga jejaring sosial ini membuat pribadi yang berbeda antara dunia nyata dan dunia maya.

Media sosial merupakan suatu media yang digunakan manusia untuk saling berinteraksi dan bersosialisasi secara online tanpa ada batasan ruang dan waktu. Manusia dapat berkomunikasi satu dengan yang lain melalui media sosial tanpa memperhitungkan tempat dan jarak menjadikan dunia bebas tanpa batasan di dunia maya. Layanan media sosial seperti *youtube*, *facebook*, *twitter*, *Instagram*, *whatshap*, *skype*, *line* dan lain-lain berkembang sangat pesat dan penggunaannya sendiri selalu mengalami peningkatan. Manusia tidak mau ketinggalan satupun dari aplikasi yang ditawarkan oleh media sosial. Teknologi komunikasi baru ini memberdayakan komunikator untuk melakukan banyak hal dengan cepat seperti berbicara, menulis, mendengarkan, menginformasikan, membujuk, mendidik dan lain-lain sehingga komunikasi bisa tercipta dan pesan bisa tersampaikan (little john, Foss, Oetzel, 2017).

Fenomena globalisasi pada pemanfaatan teknologi komunikasi yang sangat pesat menjadikan masa disruptif ini semakin lengkap. Sekarang banyak orang secara mudah mendapatkan informasi sesuai apa yang mereka butuhkan di media

online. Konten dan desain diperoleh sangat cepat baik berupa video, gambar, audio maupun yang lainnya, sehingga menciptakan interaksi sosial yang sangat cepat pula. Perkembangan media online yang sangat pesat memberikan informasi yang aktual dan mudah diakses oleh banyak orang. Hal ini menunjukkan bahwa jejaring komunikasi sangat berperan. Era disruptif pada pemenuhan platform digital ini telah memberikan interaksi di media digitalisasi. Adapun interaksi yang ditunjukkan di media internet bisa berupa *share*, *subscribe*, *follower*, *like*, *DM* maupun *comment* dimana telah menjadi penanda tentang keberadaan seseorang di dunia digital. Kemajuan teknologi yang sangat cepat ini menuntut masyarakat harus bijaksana dan cermat dalam menyikapi hadirnya media baru yang sudah bergeser ke digitalisasi. Kehadiran media baru atau *new media* dengan pemanfaatan kecanggihan teknologi digital seperti media internet ini harus disikapi oleh masyarakat dan masyarakat diharapkan memiliki kesiapan dengan munculnya media baru ini. Tetapi apakah kita juga sempat berpikir bahwa era disruptif ini merupakan suatu masa dimana komunikasi itu terjalin antara kita dengan orang ataukah sebaliknya yaitu komunikasi kita dengan benda?

*New media* yang direpresentasikan oleh media sosial ini diharapkan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan sebagaimana mestinya. Selain itu media ini bisa dioptimalkan dengan baik dan bisa berfungsi demi kebaikan bersama. Apabila manusia dapat memanfaatkan media sosial ini dengan baik dan bijaksana, maka

akan mendapatkan berbagai macam kemudahan dalam memperoleh informasi dan lainnya. Tetapi sebaliknya apabila masyarakat tidak bisa mengontrol penggunaan media ini dengan baik, maka akan mengalami ketergantungan yang luar biasa yang bisa mengakibatkan seseorang itu salah satunya yaitu kecanduan, kecemasan dan depresi. Selain itu dampak penggunaan media online apabila dilakukan secara aktif dan intens dapat mengakibatkan krisis komunikasi sosial karena kecenderungan lebih senang dengan dunia maya apabila dibandingkan dengan dunia nyata sehingga lebih bersifat individualistis. Oleh karena itu kita dituntut untuk menggunakan *new media* pada *society 4.0* di era disruptif ini secara bijaksana dan bermanfaat dengan membuat konten-konten yang produktif dan positif di dunia maya, sehingga untuk kedepannya memiliki kesiapan untuk menyongsong era *society 5.0 (Imagination society)*.

### **Refferensi :**

Littlejohn, Foss, Oetzel. 2017. *Theories of Human Communication*. Waveland Press, Inc

Santoso, Setiansah. 2010. *Teori Komunikasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Webinar STMM. 4 Juni 2020. *Human Centered of Technology Menyongsong masyarakat 5.0*.

Zarela, D.2010. *The Social Media Marketing Book*. O'Reilly Media Inc.

# Menakar *Side Effect* RI 4.0 dan Kesiapan Indonesia

Hasna Wijayati, S.IP., M.A.  
hasna.fisip@gmail.com

Revolusi Industri keempat seolah menghadirkan jawaban kreatif bagi para pebisnis kreatif dan penyuka tantangan. Kehadiran RI 4.0. menghadirkan banyak perubahan bagi dunia, sehingga siapa pun membutuhkan penyesuaian, termasuk bagi Indonesia. Sementara itu, berbagai fasilitas dan teknologi baru terus bermunculan. Era RI 4.0 memang memunculkan konsep baru yang seringkali sulit dipahami oleh para pebisnis konvensional. Bagaimana tidak, bermunculan konsep bisnis baru yang begitu unik sehingga membuka peluang bagi berbagai perusahaan untuk dapat bekerja dengan modal fisik yang sangat minim. Meski bermodal minim, potensi keuntungan yang bisa dinikmati luar biasa besar bahkan jauh melebihi bisnis konvensional yang dibangun dengan mengandalkan modal fisik yang besar. Contoh nyatanya adalah Go-Jek. Perusahaan jasa transportasi ini bahkan tidak memiliki armadanya sendiri, tapi ia mampu menikmati nilai valuasi hingga 12 kali lipat lebih besar daripada Garuda Indonesia (Arif Budiman, 2019).

Era disrupsi menggelar peluang bagi siapa pun yang berjiwa petualang dan merasa tertantang untuk menjadi besar, tumbuh dan berkembang. Siapa pun bisa berlomba menghadirkan konsep bisnis baru yang potensial selama ia mampu memanfaatkan teknologi 4.0,

untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, sayangnya, ada *side effect* yang cukup mencengangkan dunia. Dalam penelitiannya di tahun 2016, McKinsey menyatakan bahwa *digital technology* menuju revolusi industri 4.0 berpotensi menghilangkan 52,6 juta jenis pekerjaan di dunia, dalam waktu lima tahun ke depan. Puluhan juta jenis pekerjaan ini diperkirakan mengalami pergeseran, bahkan hilang dari peradaban manusia.

Merujuk hasil penelitiannya, kita ditunjukkan bahwa era disrupsi ini telah melahirkan kompetisi global yang sangat ketat. *Competitive advantage* adalah hal yang wajib dikembangkan untuk memastikan bahwa kita benar-benar siap menghadapi RI 4.0. Pertanyaan mengenai “seberapa siap kita” dalam menghadapi RI 4.0 adalah hal penting. Kita perlu menakar seberapa siap kita sebagai individu, sekaligus seberapa siap Indonesia dalam menyajikan kebijakan serta lahan untuk mendukung ekosistem perkembangan RI 4.0 bagi masyarakatnya.

Untuk memahami kesiapan tersebut, hal yang perlu dipahami lebih dulu adalah tentang tantangan apa yang sedang dihadapi. Bagi individu, langkah persiapan pentingnya adalah dengan mempersiapkan skill. Caranya dapat dilakukan dengan mengembangkan *behavioral attitude*, memperkaya kompetensi diri dan meningkatkan semangat literasi. Sedangkan bagi negara, perlu dengan menilai berbagai input yang ada di masyarakat, untuk kemudian diproses, dan pada akhirnya menghasilkan output berupa kebijakan yang tepat. Indonesia perlu menyajikan skema tepat agar

SDM bisa memiliki kesempatan dan kemampuan untuk mengembangkan tiga poin tadi.

Salah satu jalan untuk bisa mendapatkan ketiga poin tadi bisa dilakukan lewat jalur pendidikan. Pendidikan harus dirancang dengan skema *long life education*, sehingga daya kreativitas dapat terasah dengan optimal. Menikmati pendidikan hanya di dalam kelas bukan lagi skema efektif di masa sekarang. Jalur pendidikan RI 4,0 yang mengarah pada era disrupsi menuntut manusia memiliki kompetensi yang membaur dalam kehidupan. Lewat berbagai pengamatan lingkungan sekitar dan interaksi, SDM akan mampu meningkatkan *skill* dan kompetensi. Adanya pengalaman dan bekerja sama dengan semakin banyak pihak juga dapat mengasah *skill* semakin baik.

Era disrupsi hadir dengan wajah yang sangat berbeda karena adanya inovasi otomasi berupa *super-computer*, *robotic artificial intelegency* hingga modifikasi genetik. Konsekuensi logis dari berbagai teknologi ini adalah hadirnya perubahan besar-besaran di berbagai bidang kehidupan manusia, entah sosial, ekonomi, politik, hingga relasi internasional. Perangkat baru, jenis pekerjaan baru dan pola interaksi baru akan muncul dan membuat hal lainnya mulai ditinggalkan bahkan menghilang. Dalam kondisi ini, tenaga kerja sektor padat karya berpotensi mendapat imbas paling besar. Sebab, akan ada banyak tenaga mesin otomasi dan digitalisasi yang mampu menggantikan kinerja SDM dengan lebih baik. Ini lantaran mesin digital dengan sistem otomasi yang dimilikinya punya kemampun

untuk bekerja lebih cepat dan akurat daripada manusia (Suwardana, 2017).

Kondisi ini sudah berjalan di berbagai belahan dunia, dan beberapa di Indonesia. Pabrik-pabrik bernuansa modern mulai banyak mengandalkan mesin dan teknologi digital. Dengan kehadiran teknologi baru, pabrik-pabrik ini bahkan mampu menghasilkan produk dengan kualitas lebih unggul dan kuantitas lebih banyak. Hal ini terjadi di sektor industri hingga di sektor agraris. Namun sayangnya, penerapan dan percepatan RI 4.0 ini lebih banyak terjadi di negara-negara maju di luar Indonesia.

Efisiensi dalam dunia industri memang bisa melesat cepat dengan RI 4.0. Tapi, untuk bisa memanfaatkannya bukanlah hal mudah. Kita harus benar-benar siap dengan modal, kemampuan dalam memahami produk teknologi, serta yang membuat dilematis adalah pengurangan tenaga kerja. Jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar, disertai masih tingginya angka pengangguran di Indonesia yang masih lebih dari 7 juta orang di tahun 2019 (Kumparan, 2020), membuat Indonesia tidak bisa meninggalkan industri padat karya begitu saja.

Kehadiran revolusi industri bahkan laksana pisau bermata dua. Pada satu sisi, sektor industri, produktivitas tenaga kerja dan efisiensi proses produksi dapat meningkat optimal. Namun di sisi lain, RI 4.0 juga dapat mengancam eksistensi tenaga kerja sehingga mengakibatkan banyak tenaga kerja bisa tersisihkan. Dunia kerja yang semakin kompetitif akan memberikan seleksi semakin ketat sehingga hanya mereka dengan kompetensi tepat bisa bertahan.



Padahal, jika melihat tingkat pendidikan Indonesia, kita masih berada di peringkat 72 dari 77 negara berdasarkan penelitian yang dilakukan Programme for International Student Assessment (PISA) di tahun 2019 (DW, 2019). Bukankah ini berarti bahwa kesiapan SDM Indonesia masih belum optimal?

Sementara masih banyak SDM yang belum siap, tentu berpotensi menghasilkan berbagai masalah sosial baru. Jika ini terjadi, stabilitas ekonomi dan politik Indonesia dapat terganggu. Untuk itulah, penting membangun sinergi yang tepat sehingga masyarakat maupun pemerintah dapat sama-sama siap untuk menghadapi revolusi industri keempat ini. Berbagai inovasi kebijakan harus terus dilakukan.

Di tingkat individu, upaya meningkatkan kompetensi juga harus terus dilakukan agar bisa ikut berinovasi. Dalam RI 4.0, inovasi adalah hal yang mampu menentukan daya saing individu, perusahaan ataupun negara. Capaian inovasi dipengaruhi oleh sejauh manarumusan “*body of knowledge*” yang dikatkan dengan *transfer of technology*, manajemen inovasi, *business incubation*, serta *science and Technopark*.

Jika diuraikan, beberapa *side effect* RI 4.0 yang mungkin dihadapi dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Pesatnya peremkangan industri dan ekonomi**

Kemajuan teknologi, modernisasi, otomasi dan pencapain lain dalam dunia teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan proses produksi. Ini menghasilkan transisi proses produksi yang dapat mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi

secara pesat. Dunia industri akan maju pesat karena dapat menghasilkan produk dengan cara lebih efisien.

- **Perkembangan bakat dan sistem pendidikan**

RI 4.0 dapat menghasilkan nuansa baru pada sistem pendidikan sehingga mengubah pola manusia dalam mengembangkan bakatnya. Ini karena manusia dituntut untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri. Bahkan, kehadiran produk digital yang mampu menjadi detektor bakat seseorang juga dapat mempengaruhi bagaimana seseorang mengembangkan kompetensi. Seorang bayi pun dapat mulai dideteksi terkait bakat dan minatnya. Kini, untuk bisa menjadi seorang ahli dalam berbagai bidang, tanpa harus menempuh pendidikan formal. Seorang dengan kemampuan *self learning* yang baik, dapat mengembangkan bakat, minat dan kompetensinya secara bebas dengan memanfaatkan dunia maya dan media lain yang tersedia.

- **Kolaborasi manusia bersama robot dan *Artificial Intelligence***

Di era disrupsi ini, robot bukan lagi barang eksklusif. Berbagai negara telah sukses mengembangkan robot-robot dalam aneka ragam bentuk dan fungsi. Robot-robot ini pun kian canggih dan semakin detail, serta telah dibekali (*Artificial Intelligence*). Hasilnya, robot memiliki kemampuan untuk menggantikan posisi manusia dalam menjalankan pekerjaan. Indonesia pun telah banyak mengembangkan robot, meski tidak sesanter di negara maju. Telah bermunculan pola sekolah robotic di berbagai daerah sehingga dapat mendorong perkembangan industri robot di Indonesia.

- **Penataan sistem regulasi**

Era disrupsi menghadirkan dampak yang semakin kompleks dalam berbagai tatanan kehidupan manusia. Ini membutuhkan penataan sistem regulasi yang baru. Sebab, tatanan ekonomi, sosial, politik dan berbagai ranah kehidupan masyarakat lain pun berubah menyesuaikan revolusi yang baru. Perbaruan sistem regulasi harus dilakukan agar lebih pas untuk mengelola masyarakat dan pemerintah. Regulasi seperti *cyber crime*, perpajakan *e-commerce*, hingga investasi berskala global harus memiliki regulasi sehingga kepentingan bersama bisa terlindungi.

- **Hubungan sosial masyarakat**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan pernah dapat melepaskan diri dari interaksi sesama manusia. Dalam era baru ini, hubungan sosial masyarakat atau cara manusia berinteraksi dengan sesamanya pun ikut mengalami perubahan. Interaksi akan banyak tercipta dengan memanfaatkan perkembangan digital, seperti dengan hubungan pada dunia maya, bercengkerama melalui media sosial, pemanfaatan media untuk promosi, mencari dukungan politik, hingga propaganda.

Kehadiran Revolusi Industri 4.0 adalah hal yang tak dapat ditolak. Kehadirannya nyata dan sudah pasti ada di tengah kehidupan masyarakat. Untuk itu, Indonesia harus bisa memastikan kesiapannya untuk menghadapi RI 4.0. Tingkat kesiapan sangat berpengaruh pada posisi kita dalam peradaban manusia. Jangan sampai peluang besar ini justru menjadi kebakan yang mengakibatkan kita mengalami ketergantungan terhadap dunia lain

dan kalah dengan kompetisi. Manusia harus semakin akrab dengan teknologi dan menguasainya, alih-alih menjadikan teknologi sebagai candu dan hanya menikmatinya sebagai konsumen yang tidak produktif.

Penerapan Revolusi Industri 4.0 melahirkan *side effect* yang begitu besar bagi dunia internasional, termasuk Indonesia. Automatisasi dunia digital, *Smart Factory*, *internet of things*, *artificial intellegent*, berbagai konsep ini harus bisa dikuasai dengan baik. Berbagai hal ini nantinya akan masuk pada klaster-klaster yang dikatakan oleh Professor Schwab, sebagai klaster *side effect* revolusi industri keempat.

- a. Klaster Ekonomi : melahirkan perubahan signifikan pada pertumbuhan, pekerjaan, dan sifat kerja.
- b. Klaster Bisnis : menghadirkan perubahan signifikan pada ekspektasi konsumen serta penyesuaian produk, proses pengolahan dan penyajian data yang lebih baik, adanya inovasi kolaboratif yang menguntungkan, hadirnya model operasi baru dalam bisnis.
- c. Klaster Hubungan Nasional-Global-Pemerintahan : melahirkan perubahan dalam pola hubungan nasional dan global, juga dengan pemerintahan. Ini adalah pola baru yang merujuk pada pelaku Negara, Region dan Kota, serta dalam konsep keamanan internasional.
- d. Klaster Masyarakat : mengakibatkan semakin meningkatnya ketimpangan dan kelas menengah, dan juga memunculkan komunitas-komunitas baru.

- e. Klaster Individu : menghadirkan perubahan orientasi dalam identitas, moralitas dan etika individu; perubahan pola koneksi antar-manusia, serta pengelolaan informasi publik dan privat yang berubah (Nugraha, 2017).

Bagi Indonesia, klaster ini pun juga harus dihadapi keseluruhannya. Tiap-tiap klaster butuh penyesuaian sendiri. Bagi Indonesia, tugas untuk mengkomodir kepentingan di tiap klaster bukan perkara mudah. Indonesia masih belum bisa disebut sebagai negara maju karena pencapaian teknologinya yang belum tinggi. Namun, Indonesia pun juga sudah bukan termasuk negara berkembang dunia ketiga, mengingat World Bank telah menyebut Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi besar di Asia Tenggara. Indonesia bahkan tak pernah absen untuk mencatatkan kenaikan GDP per kapita secara konsisten dari nilai \$807 di tahun 2000 hingga telah mencapai \$3,877 di tahun 2018, setiap tahunnya. Indonesia juga merupakan negara dengan kekuatan daya beli peringkat 10 terbaik dunia. Berbagai pencapaian ini menunjukkan bahwa pencapaian Indonesia untuk menuju negara maju semakin terang (World Bank, 2019).

Dengan potensi kemajuan ekonomi yang besar, Indonesia memiliki kesempatan besar pula untuk bisa memenangkan revolusi industri 4.0 ini. Bekal kemampuan ekonomi ini akan lebih optimal ketika disertai kebijakan yang tepat, dan adanya sinergi antara masyarakat dengan pemerintah. Seluruh elemen masyarakat harus

mampu bekerja sama dengan pemerintahan untuk bersama-sama meningkatkan kompetensi, dan menghasilkan regulasi yang tepat.

### **Referensi:**

Dadan Nugraha. 2017. Transformasi Sistem Revolusi Industri 4.0, dalam makalah Workshop Technopreneurship “Road to TBIC 2019”, 30 September 2018

DW. 2019. Survei Pendidikan Dunia, Indonesia Peringkat 72 dari 77 Negara, diakses dari <https://www.vivanews.com/berita/dunia/23062-survei-pendidikan-dunia-indonesia-peringkat-72-dari-77-negara?medium=autonext>

Hendra Suwardana. 2017, Revolusi Industri 4. 0 Berbasis Revolusi Mental, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, Jurnal JATI UNIK, 2017, Vol.1, No.2, Hal. 102-110

Kumparan. 2020. Indonesia Darurat Pengangguran, Benarkah? Diakses dari <https://kumparan.com/kumparanbisnis/indonesia-darurat-pengangguran-benarkah-1ssjXMty8F0/full>

Prof. Dr. Arief Budiman. 2019. Kolom pakar: Industri 4.0 vs Society 5.0, diakses dari <http://ft.ugm.ac.id/kolom-pakar-industri-4-0-vs-society-5-0/>

The World Bank. 2019. The World Bank In Indonesia, diakses dari <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview>

---